



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

2024



kanwilkalteng@kemenag.go.id

www.kalteng.kemenag.go.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	6
C. Arah Kebijakan dan Strategi	7
D. Isu – Isu Strategis.....	9
E. Sumber Daya	12
F. Indikator Kinerja Utama	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Kinerja.....	17
B. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	141
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Penutup.....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2024. Di dalamnya tercermin capaian kinerja yang telah diupayakan secara optimal oleh seluruh jajaran, sebagai wujud komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil. Selain itu, laporan ini juga menjadi media refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, dedikasi, dan kerja keras sepanjang tahun 2024. Tanpa kebersamaan dan semangat kolaborasi, capaian ini tentu tidak akan terwujud sebagaimana mestinya.

Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi ke depan. Besar harapan kami, capaian yang telah diraih dapat menjadi pemantik semangat untuk terus melakukan inovasi, perbaikan berkelanjutan, serta penguatan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berintegritas demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa.

Palangkaraya, 10 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah,



H. Noor Fahmi

IKHTISAR EKSEKUTIF



Kakanwil Kemenag Prov. Kalteng Pada Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2024 dihadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani, penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan good governance. LKj ini merupakan perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2024. Laporan kinerja ini merupakan laporan keempat dari periode Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengelola pagu anggaran sebesar Rp.107.477.711.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.906.366.063,- atau sebesar 99,47%. Terdapat kenaikan pagu anggaran dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu pagu sebesar Rp. 91.640.707.000,- dengan realisasi anggaran Rp.90.598.372.049,- atau 98,86%. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut, Sasaran Kegiatan berjumlah 53 sasaran dan Indikator Kinerja berjumlah 134 indikator yang menjadi target kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil capaian kinerja pada aplikasi SIPKA yaitu 97,99% dengan predikat kategori BAIK. Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 98,76%.

Tema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Agama Tahun 2024 adalah: “*Transformasi Kementerian Agama Menuju Indonesia Emas 2045*”, Tema ini mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat akuntabilitas kinerja melalui transformasi birokrasi dan peningkatan layanan keagamaan. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadilan.

Dalam implementasinya, SAKIP 2024 mencakup proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja yang diarahkan untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan keagamaan dan pendidikan keagamaan.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tercermin dalam laporan ini, dapat disampaikan bahwa sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 berhasil dicapai dengan baik. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi yang solid, serta komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan program prioritas dan kegiatan strategis.

Namun demikian, dalam semangat perbaikan berkelanjutan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menyadari perlunya langkah-langkah strategis yang lebih progresif di masa yang akan datang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh *Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)* yang telah diperjanjikan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kelemahan dan tantangan yang masih ditemukan pada Tahun 2024 akan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif guna merumuskan kebijakan dan pendekatan baru. Diperlukan terobosan-terobosan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, agar sistem Reformasi Birokrasi yang dijalankan benar-benar mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Seluruh sumber daya yang dimiliki baik SDM, teknologi, maupun anggaran harus dioptimalkan agar peningkatan kinerja bukan hanya menjadi target, tetapi juga menjadi budaya kerja yang berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas utama yang dijalankan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

1. Perumusan dan Penetapan Visi, Misi, dan Kebijakan Teknis.

Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk merumuskan visi, misi, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan serta bimbingan kehidupan beragama di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman yang diberikan oleh Menteri Agama serta penyesuaian terhadap kondisi sosial, budaya, dan agama yang ada di provinsi tersebut.

2. Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan Kehidupan Beragama.

Fungsi ini mencakup pelayanan kepada masyarakat dalam bidang agama, termasuk bimbingan kehidupan beragama bagi umat yang berbeda agama, dengan tujuan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Pembinaan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan dakwah, pelatihan, dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

3. Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan Haji dan Umrah, Zakat, dan Wakaf.

Kantor Wilayah juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mencakup perencanaan, koordinasi, serta pembinaan kepada calon jemaah haji dan umrah. Selain itu, tugas ini juga mencakup pengelolaan dan pembinaan zakat dan wakaf, untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat melalui dana zakat serta pemanfaatan aset wakaf.

4. Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Kantor Wilayah bertanggung jawab dalam pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, serta pendidikan keagamaan di kalangan umat. Pelayanan yang diberikan meliputi penyusunan kurikulum pendidikan agama, pelatihan guru, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan di madrasah dan lembaga pendidikan agama.

5. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menyelenggarakan dialog antar agama dan kegiatan lain yang mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan dalam keberagaman.

6. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi.

Kantor Wilayah juga bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan terkait pengelolaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi, yang memastikan seluruh aktivitas dan program berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini mencakup pelaporan keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, serta pengelolaan data yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kementerian.

7. Pengkoordinasian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Pengawasan.

Kantor Wilayah memiliki fungsi dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengawasi program-program yang dilaksanakan di wilayahnya. Hal ini untuk memastikan bahwa semua program berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

8. Pelaksanaan Hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, dan Lembaga Masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah juga melaksanakan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kementerian Agama di tingkat provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada PMA Nomor 6 Tahun 2022 yang mencakup berbagai bagian dan bidang dengan tugas masing-masing. Struktur organisasi tersebut terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha berfungsi untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kebijakan teknis administrasi serta pelayanan di Kantor Wilayah. Fungsi utama Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan perencanaan anggaran, pelaporan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia.

2. Bidang Pendidikan Madrasah.

Bidang ini bertugas untuk menyusun kebijakan teknis terkait pendidikan madrasah, serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap kegiatan pendidikan di madrasah, baik dalam hal kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, maupun pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

3. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Bidang ini bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan teknis pendidikan agama Islam di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi agama Islam. Termasuk dalam tugasnya adalah pembinaan terhadap pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bidang ini bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara teknis, termasuk di dalamnya penyusunan kebijakan, pelayanan pendaftaran haji dan umrah, pengelolaan administrasi, serta evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

Bidang ini bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Islam, termasuk urusan agama Islam dan syariah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat.

6. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.

Bertugas untuk menyusun kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat Kristen di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam hal urusan agama, pendidikan agama Kristen, serta budaya keagamaan Kristen.

7. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu.

Bidang ini bertugas dalam penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap masyarakat Hindu di bidang agama, pendidikan agama Hindu, serta pemberdayaan umat Hindu.

8. Pembimbing Masyarakat Katolik.

Bertugas dalam melaksanakan kebijakan teknis dan pembinaan masyarakat Katolik dalam hal urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

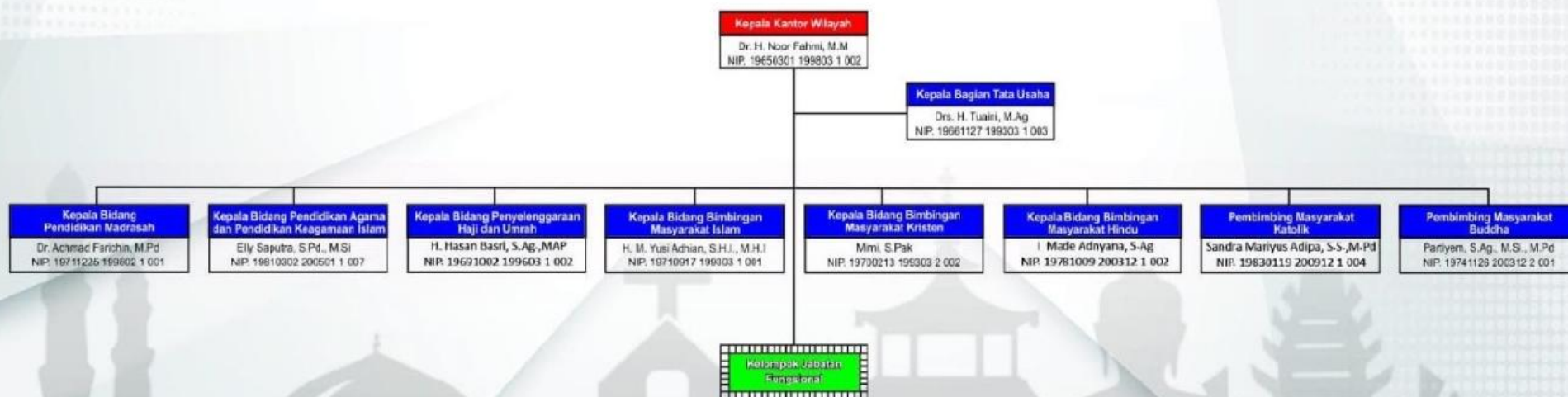
9. Pembimbing Masyarakat Buddha.

Bidang ini berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat Buddha, khususnya dalam hal urusan agama, pendidikan agama, serta pengelolaan sistem informasi mengenai keagamaan Buddha.

Seluruh tugas dan fungsi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kehidupan beragama, dan pendidikan agama di provinsi tersebut. Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur dalam PMA Nomor 6 Tahun 2022 menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas Kantor Wilayah, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang transparan dan akuntabel.



**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024
(BERDASARKAN PMA NOMOR 6 TAHUN 2022)**



B. Visi, Misi dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, Kementerian Agama menetapkan arah strategis pembangunan nasional di bidang agama melalui rumusan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

VISI:

"Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong."

Visi ini menggambarkan komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul, berintegritas, serta berorientasi pada pembentukan karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

MISI:

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan enam misi utama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, melalui bimbingan, pembinaan, dan pelayanan keagamaan yang mendorong peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara inklusif.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan bangsa dan stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, agar setiap warga negara memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan keagamaan yang berkualitas.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, khususnya pendidikan agama dan keagamaan, guna menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta pengembangan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.

TUJUAN:

Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi di atas, ditetapkan enam tujuan strategis Kementerian Agama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, melalui pelayanan keagamaan yang mendukung pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama secara benar dan bertanggung jawab.
2. Memperkuat kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, guna menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di tengah perbedaan keyakinan.
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas umat beragama yang menerima layanan keagamaan, dengan memperluas jangkauan serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.
4. Meningkatkan jumlah peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal di bawah binaan Kementerian Agama.
5. Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif, agar mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional dan kompetitif di tingkat global.
6. Meningkatkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif, demi terciptanya institusi yang dipercaya publik dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat dan profesional.

C. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Kementerian Agama dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, khususnya di bidang agama dan pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, yang menitikberatkan pada tujuh agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan menghadapi perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama berfokus pada tiga agenda utama, yaitu:

Agenda ke-3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Agenda ke-4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Agenda ke-7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1. Strategi dan Program Prioritas dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Untuk mendukung agenda peningkatan SDM, pemerintah merumuskan berbagai strategi nasional yang dijabarkan dalam program-program prioritas berikut:

- a. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Kementerian Agama berperan aktif dalam mendukung agenda ini, khususnya melalui peningkatan mutu layanan pendidikan keagamaan, penguatan peran lembaga pendidikan di bawah binaan Kemenag, serta pembinaan SDM yang unggul dan moderat.

2. Strategi dan Program Prioritas dalam Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sebagai bagian dari revolusi mental dan pembangunan karakter bangsa, strategi nasional diarahkan pada program prioritas berikut:

- a. Penguatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Penguatan moderasi beragama; dan
- d. Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Kementerian Agama secara khusus bertanggung jawab dalam implementasi program penguatan moderasi beragama sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong transformasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama.

3. Strategi dan Program Prioritas dalam Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) serta mendorong transformasi pelayanan publik, arah kebijakan nasional menetapkan strategi dan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan pemerintah;
2. Pembangunan sistem hukum nasional yang adil dan tidak diskriminatif;
3. Penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi;
4. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional;
5. Percepatan transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada digitalisasi dan kemudahan akses; serta
6. Peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) yang bersih, melayani, dan responsif.

D. Isu – Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Agama serta menjawab tantangan zaman, Kementerian Agama telah menetapkan tujuh program prioritas yang menjadi fokus kebijakan strategis selama periode 2020–2024. Setiap program prioritas dirancang sebagai respon terhadap isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat dan tantangan internal kelembagaan. Adapun isu-isu strategis dari ketujuh program prioritas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Moderasi Beragama.

Isu strategis yang dihadapi dalam penguatan moderasi beragama adalah meningkatnya potensi intoleransi, radikalisme, serta konflik horizontal

berbasis agama. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan keberagaman menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi secara sistemik melalui pendidikan, dakwah, dan kebijakan publik.

2. Transformasi Digital.

Transformasi digital menjadi keharusan di tengah arus revolusi industri 4.0 dan era masyarakat digital. Namun demikian, Kementerian Agama menghadapi isu terbatasnya infrastruktur digital, belum optimalnya integrasi dan digitalisasi layanan keagamaan serta pendidikan, serta rendahnya literasi digital di kalangan ASN maupun masyarakat. Upaya percepatan digitalisasi memerlukan dukungan regulasi, anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM yang memadai.

3. Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Revitalisasi KUA menjadi langkah strategis untuk menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Isu strategis yang muncul antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, SDM yang belum merata dari sisi kompetensi, serta citra KUA yang masih terbatas pada layanan pencatatan nikah. Diperlukan reposisi peran KUA agar mampu memberikan layanan keagamaan lintas agama dan lintas sektor kehidupan.

4. Kemandirian Pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam pembinaan umat. Namun demikian, masih terdapat ketergantungan pesantren terhadap bantuan pemerintah, lemahnya manajemen kelembagaan dan kewirausahaan, serta terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kemandirian pesantren menjadi penting melalui pendekatan pengembangan ekonomi berbasis pesantren (ekopesantren), pelatihan kewirausahaan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri.

5. Cyber University.

Program Cyber University hadir sebagai jawaban atas tuntutan zaman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis teknologi digital. Isu strategisnya meliputi terbatasnya regulasi dan kebijakan pendukung, keterbatasan

infrastruktur, serta tantangan dalam menjaga kualitas dan mutu pembelajaran daring. Penguatan tata kelola, pengembangan platform pembelajaran digital, serta peningkatan kapasitas dosen menjadi langkah penting untuk mewujudkan perguruan tinggi keagamaan yang adaptif dan modern.

6. Religiosity Indeks.

Dalam rangka merumuskan kebijakan berbasis data dan mengukur tingkat religiusitas masyarakat secara objektif, Kementerian Agama mengembangkan Indeks Religiusitas. Isu strategis yang muncul adalah belum tersedianya instrumen ukur yang komprehensif dan terstandar secara nasional. Pengembangan metodologi, indikator yang akurat, serta mekanisme pengumpulan data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

7. Tahun Kerukunan Umat Beragama.

Menyikapi dinamika sosial dan politik yang berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama, Kementerian Agama mencanangkan Tahun Kerukunan sebagai bentuk afirmasi atas pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama. Isu strategis dalam program ini adalah belum optimalnya kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kerukunan, serta kurangnya ruang dialog antarumat beragama di tingkat akar rumput.

7 Kebijakan Prioritas Kementerian Agama



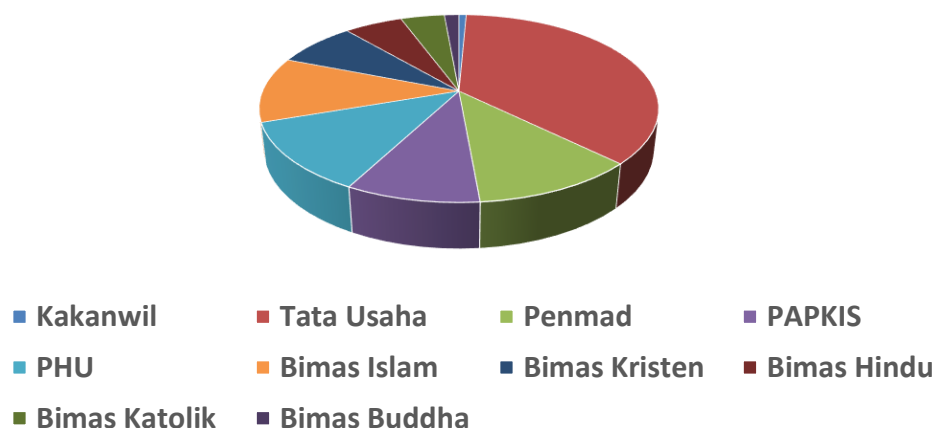
E. Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dibantu oleh 9 orang Eselon III. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh 142 pegawai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan berbagai latar belakang baik jenis kelamin, agama, pendidikan dan lain-lain. Berikut sajian data pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Data Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja

No.	Unit Kerja	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	Kepala Kantor Wilayah	1	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	37	15	52
3.	Bidang Pendidikan Madrasah	12	4	16
4.	Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam	10	3	13
5.	Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	16	1	17
6.	Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	14	2	16
7.	Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen	7	4	11
8.	Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu	5	3	8
9.	Pembimbing Masyarakat Katolik	4	2	6
10.	Pembimbing Masyarakat Buddha	1	1	2
Total		107	35	142

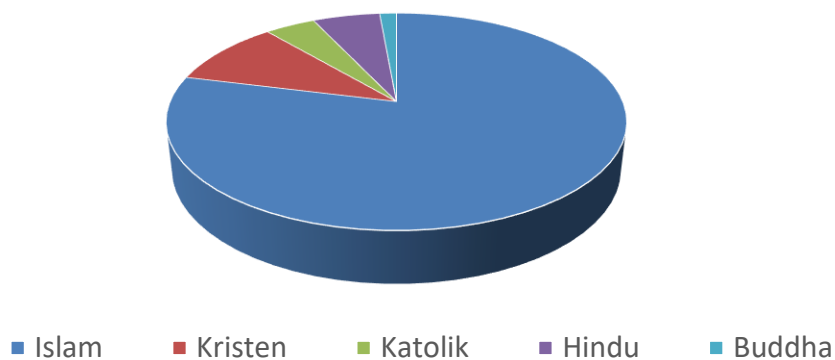
Data Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja



2. Data Pegawai Berdasarkan Agama

No.	Agama	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	Islam	88	24	112
2.	Kristen	9	5	14
3.	Katolik	4	2	6
4.	Hindu	5	3	8
5.	Buddha	1	1	2
Total		107	35	142

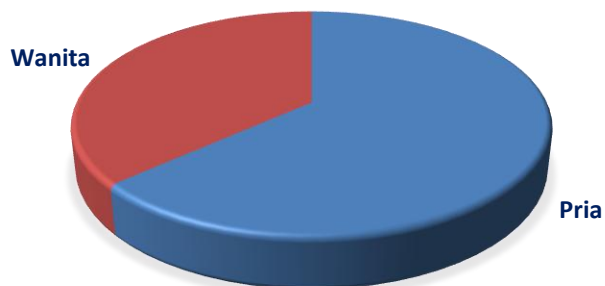
Data Pegawai Berdasarkan Agama



3. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Agama	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	Pria	67	23	90
2.	Wanita	40	12	52
Total		107	35	142

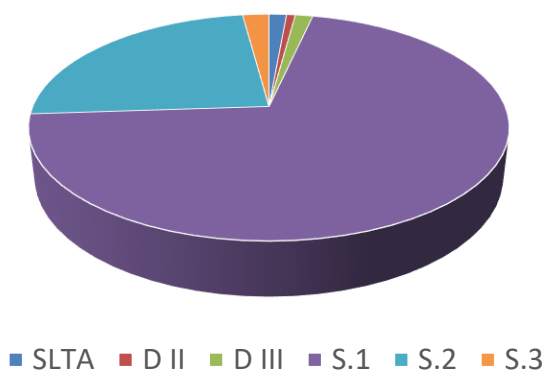
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



4. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Agama	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	SLTA	2	-	2
2.	D II	1	-	1
3.	D III	2	-	2
4.	S.1	65	35	100
5.	S.2	34	-	34
6.	S.3	3	-	3
Total		107	35	142

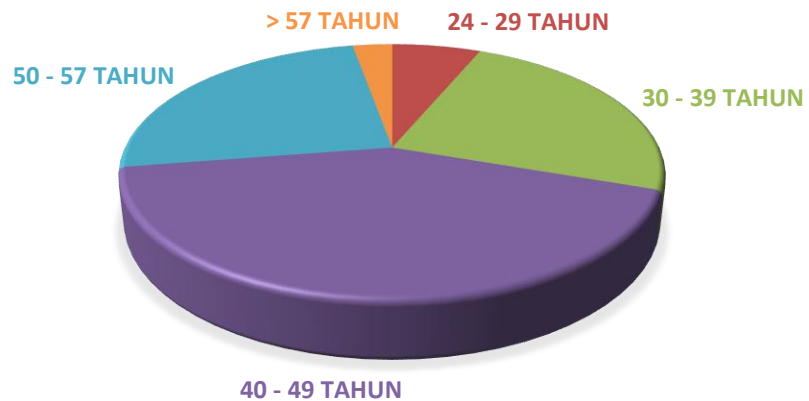
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



5. Data Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Agama	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	KURANG DARI < 24 TAHUN	-	-	-
2.	24 - 29 TAHUN	1	8	9
3.	30 - 39 TAHUN	11	23	34
4.	40 - 49 TAHUN	57	3	60
5.	50 - 57 TAHUN	34	1	35
6.	LEBIH DARI 57 > TAHUN	4	-	4
Total		107	35	142

DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA



6. Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Agama	Dalam Orang		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	Golongan II	1	-	1
2.	Golongan III	83	-	83
3.	Golongan IV	23	-	23
4.	Golongan IX	-	35	35
Total		107	35	142

DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG



F. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama Pusat, yang dijelaskan kedalam beberapa sasaran dan indikator yang tertuang

dalam Indikator Sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	a. Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah
		b. Jumlah Rumah Ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	a. Jumlah penyelesaian konflik umat beragama
		b. Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Keagamaan	a. Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar
		b. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi Standar
		c. Jumlah Kitab Suci yang dibagikan Ke masyarakat
		d. Lembaga Sosial Keagamaan yang terdaftar
		e. Indeks Kepuasan Layanan KUA
		f. Indeks Kepuasan Layanan Jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal
		g. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri
4.	Meningkatnya akses layanan pendidikan	a. APK RA/Pratama Widya Pasraman
		b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
		c. APK MTs/ Wusta/SMPTK/Madyama Widya Pasraman
		d. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman
		e. APM MI/Ula/SDTK/Sdhi Widya Pasraman
		f. APM MTs/Wustha/SMPTK
		g. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman
		h. APK PTK/Ma'had Aly/PTK
5.	Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan	a. Rerata Nilai Ujian Sekolah MTS
		b. Rerata Nilai Ujian Sekolah MA
		c. Indeks Integritas Siswa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah 2024 mengacu pada Renstra 2020 – 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi acuan penyusunan Perencanaan Kinerja (Perkin) yang selanjutnya menjadi kontrak kinerja antar pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 berdasarkan renstra sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama
3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
4. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
5. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama
6. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
7. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
8. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang public
9. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam
11. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya
12. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
14. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama
15. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
16. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)
17. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

18. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus
19. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
20. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji
21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji
22. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu
23. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat
24. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf
25. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif
26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan
27. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
28. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
30. Meningkatnya kualitas penanganan ATS
31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
33. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal
34. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan
37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan
39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
40. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri
41. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
42. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

43. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel
44. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi
45. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
46. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
47. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran
48. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
49. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
50. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga
51. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi
52. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
53. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

B. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu langkah penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan dengan disertai indikator kinerja yang jelas. Melalui perjanjian ini, terjalin komitmen dan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama sebagai pemberi amanah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penerima amanah, guna mewujudkan kinerja terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk memperkuat komitmen antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, serta kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan tolak ukur yang jelas dalam mengevaluasi kinerja aparatur, menilai pencapaian atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi dasar pemberian

penghargaan atau sanksi. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai landasan bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Perjanjian Kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender setelah DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima oleh masing-masing pimpinan Kantor Wilayah.

Pada tahun 2024, Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 53 (lima puluh tiga) Sasaran Program Kegiatan dengan 135 (seratus tiga puluh lima) Indikator Kinerja, yang mencakup target-target yang disusun sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk memastikan pelaksanaan yang optimal, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dokumen perencanaan dan kinerja, termasuk dokumen Perjanjian Kinerja yang disahkan pada bulan Januari 2024. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	100	Nilai
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3 Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	5	Orang
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	50	Orang
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	Desa

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	10	Lembaga/Orang
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	14	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	40	%
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	14	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	100	%
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	100	%
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	14	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	57	Kegiatan/konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97	%
		2 Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		3 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	98,5	%
		4 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	97	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		5 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		6 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	98,5	%
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		8 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	98,5	%
		9 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	4	Kegiatan
		10 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	4	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95	%
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	97	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	28	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	15	Event

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	2	Rumah Ibadah
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	11	Paket
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	3.000	Buah
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	15	%
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	8	Layanan
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	15	Lokasi
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	24	KUA
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1	KUA
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	7000	Orang
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	100	Anak
		5 Jumlah Penghulu yang dibina	125	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	100	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	10	%
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	2	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	90	%
		2 Persentase Petugas Haji yang Profesional	90	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	80	%
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	95	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	%
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	16	Akta
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	%
		2 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadallah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80	%
		3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	11	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	91	%
		2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai	82.00	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		dasar penetapan tunjangan		
		3 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	70	Kegiatan
		4 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah	70	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	98	%
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	99	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		2 Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Mad yama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		3 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Uta ma Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		4 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	75	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	80.619	Siswa
		2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	99.50	%
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ PDF/Muadalah	100	%
		4 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	25	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	50	%
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	50	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	7.789	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	99	%
		2 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99	%
		3 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99	%
		4 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	99.50	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99.50	%
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99.00	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	99.00	%
		2 Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG	99.00	%
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	99.50	%
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	50	Madrasah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	99	%
		2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	99	%
		3 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	100	%
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100	%
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	150	madrasah
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	527	Madrasah
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	100	%
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	%
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	5	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90	%
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,	85	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti		
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	70	%
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60	%
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	70	%
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	84	%
		7 Persentase data ASN yang diupdate	95	%
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	79	%
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95	%
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	97	%
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	%
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	%
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95	%
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	100	%
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	95	%
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur	75	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		berdasarkan peta proses bisnis		
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	%
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80	%
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90	%
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	35	satker
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	35	orang
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	%
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	%
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	%
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85	%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	100	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	95	%
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	%
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90	%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	95	%
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	95	%
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	90	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	2250	orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan peraturan Menteri Agama No 94 tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

KATEGORI CAPAIAN KINERJA			
No.	KATEGORI	RENTANG NILAI	KODE
1.	SANGAT BAIK	> 100 – 120	BIRU
2.	BAIK	80 – 100	HIJAU
3.	CUKUP	50 - 79,99	KUNING
4.	KURANG	< 50	MERAH

Akuntabilitas Kinerja organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, pengukuran dan evaluasi kinerja melalui metode pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Capaian Kinerja Kantor Wlayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Data dari Aplikasi SIPKA Tahun 2024 dengan hasil capaian kinerja sebesar 97,99% dengan predikat BAIK, sebagai berikut :

No.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Nilai Sangat Baik	134 Indikator Kinerja
2.	Nilai Baik	2 Indikator Kinerja
3.	Nilai Cukup	5 Indikator Kinerja
4.	Nilai Kurang	3 Indikator Kinerja

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah mengelola pagu anggaran sebesar Rp.107.477.711.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.906.366.063,- atau sebesar 99,47%. Terdapat kenaikan pagu anggaran dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu pagu sebesar Rp. 91.640.707.000,- dengan realisasi anggaran Rp.90.598.372.049,- atau 98,86%. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut, Sasaran Kegiatan berjumlah 53 sasaran dan Indikator Kinerja berjumlah 134 indikator yang menjadi target kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Berbagai capaian kinerja dan prestasi yang diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya diuraikan pada penjelasan capaian kinerja sebagai berikut:

**Rincian Capaian Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	100 (Nilai)	100	100%	Sangat Baik
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	100%	100%	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	5 orang	5 Orang	100%	Sangat Baik
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80 Kelompok	80 Kelompok	100%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	50 Orang	50 Orang	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2 Desa	2Desa	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	10 Lembaga/Orang	12 Lembaga	120%	Sangat Baik
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	14 Orang	16 Kegiatan	115%	Sangat Baik
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100%	100%	100%	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	40%	40%	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100%	100%	100%	Sangat Baik
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	100%	100%	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	14 Lokasi	14 Lokasi	100%	Sangat Baik
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	57 Kegiatan/konten	57 Konten	100%	Sangat Baik
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97%	97%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97%	97%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	98,5%	98,5%	100%	Sangat Baik
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97%	41,33%	41,61%	Kurang
		5 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	97%	97%	100%	Sangat Baik
		6 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	98,5%	47,71%	48,44%	Kurang
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97%	60%	61,86%	Cukup
		8 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	Sangat Baik
		9 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	Cukup
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95%	95%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	97%	97%	100%	Sangat Baik
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15 Lokasi	15 Lokasi	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	28 Lokasi	18 Lokasi	64,29%	Cukup
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	15 Event	15 Event	100%	Sangat Baik
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	2 Rumah Ibadah	2 Rumah Ibadah	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1 Pengelola	1 Pengelola	100%	Sangat Baik
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	11 Paket	11 Paket	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	3.000 Buah	3.080 Buah	102.67%	Sangat Baik
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	15%	15%	100%	Sangat Baik
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	8 Layanan	8 Layanan	100%	Sangat Baik
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	15 Lokasi	15 Lokasi	100%	Sangat Baik
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20 Orang	20 Orang	100%	Sangat Baik
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	24 KUA	24 KUA	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1 KUA	1 KUA	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	7000 Orang	7000 Orang	100%	Sangat Baik
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	100 Anak	100 Anak	100%	Sangat Baik
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	100 Keluarga	100 Keluarga	100%	Sangat Baik
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100%	100%	100%	Sangat Baik
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	10%	10%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	2%	0	0%	Kurang
20	Meningkatnya kualitas pelayanan pelayaekstranan jamaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Baik
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	90%	90%	100%	Sangat Baik
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100%	100%	100%	Sangat Baik
23		1 Persentase amil yang dibina	80%	80%	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	2 Persentase lembaga zakat yang dibina	95%	95%	100%	Sangat Baik
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	16 Akta	16 Akta	100%	Sangat Baik
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80%	80%	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	691 Madrasah	691 Madrasah	100%	Sangat Baik
		4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	11 Madrasah	11 Madrasah	100%	Sangat Baik
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru/ustadz madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	91%	91%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	82%	82%	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	70 Kegiatan	83	118,57%	Sangat Baik
		4 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	70%	70%	100%	Sangat Baik
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	98%	98%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	99 %	99 %	100%	Sangat Baik
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75%	75%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase Ts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75%	75%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75%	75%	100%	Sangat Baik
		4 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	75%	75%	100%	Sangat Baik
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	80.619 Siswa	80.619 Siswa	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan/PDF Muadalah	9.950 Siswa	9.950 Siswa	100%	Sangat Baik
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	100%	100%	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	25%	25%	100%	Sangat Baik
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	50%	50%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	50%	50%	100%	Sangat Baik
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	7.789 Siswa	7.789 Siswa	100%	Sangat Baik
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	99%	95%	95,96%	Baik
		2 Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99%	99%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99%	99%	100%	Sangat Baik
		4 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	97%	97%	100%	Sangat Baik
		5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	99,5%	99,5%	100%	Sangat Baik
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99,5%	99,57	100%	Sangat Baik
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99%	79%	79,80%	Cukup
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	99%	99%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	99%	99%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	99,5%	99,5%	100%	Sangat Baik
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	50 Madrasah	50 Madrasah	100%	Sangat Baik
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	99%	99%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	100%	76%	76%	Cukup
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100%	100%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100%	100%	100%	Sangat Baik
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	150 Madrasah	148 Madrasah	98.67%	Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	527 gugus	527 gugus	100%	Sangat Baik
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	100%	100%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Sangat Baik
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	5%	5%	100%	Sangat Baik
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90%	90%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	85%	85%	101,20%	Sangat Baik
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	70%	70%	100%	Sangat Baik
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60%	60%	100%	Sangat Baik
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	70%	70%	100%	Sangat Baik
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	84%	84%	100%	Sangat Baik
		7 Persentase data ASN yang diupdate	95%	95%	100%	Sangat Baik
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	79%	79%	100%	Sangat Baik
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95%	95%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	97%	97%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99%	99%	100%	Sangat Baik
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100%	100%	100%	Sangat Baik
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95%	95%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	100%	100%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	95%	95%	100%	Sangat Baik
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75%	75%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80%	80%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	80%	100%	Sangat Baik

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Kategori
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90%	90%	100%	Sangat Baik
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	35 satker	35 Satker	100%	Sangat Baik
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	35 orang	35 Orang	100%	Sangat Baik
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	95%	95%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80%	85%	106,25%	Sangat Baik
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75%	80%	106,67%	Sangat Baik
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90%	95%	105,56%	Sangat Baik
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85%	90%	105,88%	Sangat Baik
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	100%	100%	100%	Sangat Baik
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	95%	95%	100%	Sangat Baik
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80%	80%	100%	Sangat Baik
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85%	85%	100%	Sangat Baik
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90%	90%	100%	Sangat Baik
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	95%	100%	105,26%	Sangat Baik
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	95%	100%	105,56%	Sangat Baik
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data keagamaan dan pendidikan yang valid dan reliable	90%	95%	105,26%	Sangat Baik
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	2250 orang	2250 Orang	100%	Sangat Baik
Rerata Capaian Kinerja Kanwil Kemenag Prov. Kalteng Tahun 2024					97,99%	Baik

Rincian Capaian Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Perbandingan Tahun 2023 dan 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	90 (Nilai)	90	100%	100 (Nilai)	100	100%
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	100%	100	100%	100%	100%	100%
		3 Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	5 orang	5 Orang	100%	5 orang	5 Orang	100%
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80 Kelompok	70 Kelompok	100%	80 Kelompok	80 Kelompok	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100%	100	100%	100%	100%	100%
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2 Desa	1 Desa	50%	2 Desa	2 Desa	100%
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	10 Lembaga/Orang	10 Lembaga/Orang	100%	10 Lembaga/Orang	12 Lembaga	120%
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	14 Kegiatan	12 Kegiatan	85,71%	14 Orang	16 Kegiatan	115%
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100%	100	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	40%	40	40%	40%	40%	100%
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100%
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	80%	80	100%	90%	100%	100%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	60%	60%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	60%	60%	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	14 Lokasi	14 Lokasi	100%	14 Lokasi	14 Lokasi	100%
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	45 Kegiatan/konten	45 Kegiatan/konten	100%	50 Kegiatan/konten	57 Kegiatan/konten	100%
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	94%	94%	100%	97%	97%	100%
		2 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97%	97%	100%	97%	97%	100%
		3 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	94%	94%	100%	98,5%	98,5%	100%
		4 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	95%	95%	100%	97%	41,33%	41,61%
		5 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	97%	97%	100%	97%	97%	100%
		6 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	94%	72%	76,60%	98,5%	47,71%	48,44%
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97%	97%	100%	97%	60%	61,86%
		8 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		9 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	88%	88%	100%	95%	95%	100%
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan AlQur'an	94%	94%	100%	97%	97%	100%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15 Lokasi	15 Lokasi	100%	15 Lokasi	15 Lokasi	100%
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	28 Lokasi	28 Lokasi	100%	28 Lokasi	28 Lokasi	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	15 Event	15 Event	100%	15 Event	15 Event	100%
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	3 KUA	1	33%	2 Rumah Ibadah	2 Rumah Ibadah	100%
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1 Pengelola	1	100%	1 Pengelola	1 Pengelola	100%
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	11 Paket	11 Paket	100%	11 Paket	11 Paket	100%
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	2.000 Buah	2.000 Buah	100%	3.000 Buah	3.080 Buah	102.26%
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	8%	8%	100%	15%	15%	100%
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	4 Layanan	4 Layanan	100%	8 Layanan	8 Layanan	100%
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	15 Lokasi	15 Lokasi	100%	15 Lokasi	15 Lokasi	100%
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	6 KUA	6 KUA	100%	24 KUA	24 KUA	100%
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	2 KUA	2 KUA	100%	1 KUA	1 KUA	100%
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	5000 Orang	5000 Orang	100%	7000 Orang	7000 Orang	100%
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	100 Anak	100 Anak	100%	100 Anak	100 Anak	100%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	100 Keluarga	100 Keluarga	100%	100 Keluarga	100 Keluarga	100%
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	92%	92%	100%	96%	100%	100%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	100%	10%	10%	100%
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	2%	2%	100%	2%	0	0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase pelayanan transportasi jamaah haji yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	87%	87%	100%	88%	90%	90%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	96%	96%	100%	98%	100%	100%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	50%	50%	100%	80%	80%	100%
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	87%	87%	100%	95%	95%	100%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	75%	75%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	16 Akta	16 Akta	100%	16 Akta	16 Akta	100%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	65%	65%	100%	80%	80%	100%
		3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	688 Madrasah	688 Madrasah	100%	691 Madrasah	691 Madrasah	100%
		4 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	8 Madrasah	8 Madrasah	100%	11 Madrasah	11 Madrasah	100%
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru/ustadz madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	89%	89%	100%	91%	91%	100%
		2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	89%	89%	100%	82%	82%	100%
		3 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%	70 Kegiatan	83	118,57%
		4 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	60%	60%	100%	70%	70%	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	93%	93%	100%	98%	98%	100%
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	96.50 %	67,80%	70,26%	99 %	99 %	100%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65%	65%	100%	75%	75%	100%
		2 Persentase Ts/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65%	65%	100%	75%	75%	100%
		3 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAM/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	65%	65%	100%	75%	75%	100%
		4 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	65%	65%	100%	75%	75%	100%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	80.554 Siswa	80.554 Siswa	100%	80.619 Siswa	80.619 Siswa	100%
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada sekolah keagamaan/PDF Muadalah	99%	99%	100%	9.950 Siswa	9.950 Siswa	100%
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	25%	25%	100%	25%	25%	100%
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	50%	25%	50%	50%	50%	100%
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	50%	50%	100%	50%	50%	100%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	7.425 Siswa	7.425 Siswa	100%	7.789 Siswa	7.789 Siswa	100%
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	95%	95%	100%	99%	95%	95,96%
		2 Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	95%	95%	100%	99%	99%	100%
		3 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	95%	95%	100%	99%	99%	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
		4 Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	95%	95%	100%	97%	97%	100%
		5 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	97.50%	97.50%	100%	99,5%	99,5%	100%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95%	95%	100%	99,5%	99,57	100%
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95%	95%	100%	99%	79%	79,80%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	95%	95%	100%	99%	99%	100%
		2 Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	95%	95%	100%	99%	99%	100%
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	97.50%	97.50%	100%	99,5%	99,5%	100%
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	35 Madrasah	35 Madrasah	100%	50 Madrasah	50 Madrasah	100%
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	95%	95%	100%	99%	99%	100%
		2 Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	80%	80%	100%	100%	76%	76%
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80%	80%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	80%	80%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	80%	80%	100%	100%	100%	100%
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	90 Madrasah	90 Madrasah	100%	150 Madrasah	148 Madrasah	98.67%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	433 gugus	433 gugus	100%	527 gugus	527 gugus	100%
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	90%	90%	100%	100%	100%	100%
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	92%	92%	100%	100%	100%	100%
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	5%	0%	0%	5%	5%	100%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	86%	86%	100%	90%	90%	100%
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	81%	81%	100%	85%	85%	101,20%
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	60%	60%	100%	70%	70%	100%
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	50%	50%	100%	60%	60%	100%
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	63%	63%	100%	70%	70%	100%
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	78%	78%	100%	84%	84%	100%
		7 Persentase data ASN yang diupdate	89%	89%	100%	95%	95%	100%
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	75%	75%	100%	79%	79%	100%
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	93%	93%	100%	95%	95%	100%
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	90%	90%	100%	97%	97%	100%
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	95%	97%	102%	99%	99%	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	93%	93%	100%	100%	100%	100%
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	84%	84%	100%	95%	95%	100%
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	88%	88%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	88%	88%	100%	95%	95%	100%
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	69%	37,75%	54,71%	75%	75%	100%
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	78%	58%	74,36%	80%	80%	100%
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50%	50%	100%	80%	80%	100%
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	86%	86%	100%	90%	90%	100%
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	29 satker	28 satker	96,55%	35 satker	35 Satker	100%
		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	27 orang	15 orang	55,56%	35 orang	35 Orang	100%
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	89%	89%	100%	95%	95%	100%
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	72%	56,33%	78,24%	80%	85%	106,25%
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	71%	71%	100%	75%	80%	106,67%
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	86%	86%	100%	90%	95%	105,56%
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	79%	64,50%	81,65%	85%	90%	105,88%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	85%	85%	100%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA					
			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %	Target Perkin	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja %
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	88%	88%	100%	95%	95%	100%
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	73%	73%	100%	80%	80%	100%
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	70%	70%	100%	85%	85%	100%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	85%	85%	100%	90%	90%	100%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dapelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	90%	90%	100%	95%	100%	105,26%
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	90%	90%	100%	95%	100%	105,26%
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data keagamaan dan pendidikan yang valid dan reliable	80%	80%	100%	90%	90%	100%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	2250 orang	2250 orang	100%	2250 orang	2250 orang	100%
Rerata Capaian Kinerja Kanwil Kemenag Prov. Kalteng			Tahun 2023 : 93,44% (Baik)			Tahun 2024 : 97,99% (Baik)		

Sasaran Kegiatan : 1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	orang	5	5	100% (Sangat Baik)
Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	80	80	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama mencerminkan upaya strategis untuk memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat. Fokus utama dalam peningkatan kualitas ini meliputi pengembangan metode penyuluhan yang lebih interaktif dan relevan, penyediaan materi bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan kapasitas para pembimbing agama melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan pendekatan yang terstruktur, penyuluhan agama tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga alat untuk membangun toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan peningkatan kualitas ini juga dipengaruhi oleh kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga agama, dan komunitas masyarakat. Program-program berbasis komunitas, seperti dialog lintas agama, pembinaan kelompok, dan pendampingan individu, semakin memperkuat dampak penyuluhan agama. Dengan dukungan teknologi, seperti platform digital untuk penyebaran materi bimbingan dan penyuluhan, proses ini menjadi lebih inklusif dan efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama tidak hanya berkontribusi pada pembentukan individu yang lebih religius, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih damai dan berkeadaban.

Dalam rangka meningkatkan kualitas bimbingan penyuluhan agama di Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Bimbingan Masyarakat Islam memberlakukan penilaian manual dan aplikasi e-PA dengan menekankan beberapa poin penting yang menjadi pokok penilaian atas kinerja penyuluh Agama Islam. Pertama, laporan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kedua, absensi kehadiran/keaktifan di KUA. Ketiga, keikutsertaan dalam lomba penyuluh teladan. Keempat, keikutsertaan dalam diklat substantive.

Kinerja penyuluh diukur dengan realisasi anggaran, mengingat honorarium baru dicairkan setelah penyuluh menyampaikan laporan kinerjanya.



Pembinaan Penyuluh Agama Islam

Kegiatan Pembinaan Penyuluh Agama Islam yang diikuti Penyuluh agama Islam PPPK se-Kalimantan Tengah bertujuan agar penyuluh agama Islam tidak hanya memahami ilmu agama tetapi memahami pengetahuan dan wawasan lain terutama terkait Kementerian Agama, termasuk menyebarkan Moderasi beragama dan tujuh program prioritas Kementerian Agama.



Pemilihan Penyulu Agama Islam Award Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Bimbingan dan Penyuluhan Kelompok Binaan Khusus LPKA Palangka Raya oleh Penyuluh Agama Islam

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai 100% pada empat indikator utama dalam Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama di wilayah tersebut.

Pencapaian nilai kinerja penyuluh agama sebesar 100% menunjukkan bahwa para penyuluh agama telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, memberikan dampak positif dalam membimbing masyarakat untuk memahami ajaran agama secara benar dan moderat. Selain itu, dengan 100% penyuluh agama yang dibina, Kementerian Agama memastikan bahwa seluruh penyuluh agama memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas bimbingan yang diberikan semakin meningkat.

Pembinaan terhadap lima penziar agama juga berhasil meningkatkan kompetensi mereka, memungkinkan mereka untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih efektif dan menarik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan 80 kelompok sasaran penyuluh agama menunjukkan bahwa program-program bimbingan dan penyuluhan agama telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, menciptakan dampak yang luas dalam membangun pemahaman dan toleransi antarumat beragama.

Secara keseluruhan, pencapaian 100% pada keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, yang tidak hanya memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman agama masyarakat, tetapi juga memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama di wilayah tersebut.

Dampak Positif

Pencapaian 100% pada indikator-indikator Sasaran Kegiatan 1: *Meningkatnya Kualitas Bimbingan dan Penyuluhan Agama* oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 menghasilkan dampak positif yang signifikan di berbagai aspek. Dengan mencapai nilai kinerja penyuluh agama yang sangat baik, seluruh penyuluh agama di Kalimantan Tengah memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. Hal ini berkontribusi pada penyebaran pemahaman agama yang lebih tepat, moderat, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, yang pada gilirannya mengurangi potensi pemahaman agama yang menyimpang atau ekstrem.

Selain itu, pembinaan yang berhasil dilakukan terhadap 100% penyuluh agama memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga keterampilan dalam mentransformasikan pengetahuan tersebut kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Dampaknya, masyarakat lebih menerima dan memahami pesan-pesan keagamaan yang disampaikan, yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan saling menghargai.

Pemberdayaan 80 kelompok sasaran penyuluh agama juga memberikan dampak yang luas, karena kelompok-kelompok ini mampu menyebarkan pemahaman agama yang lebih luas kepada masyarakat yang lebih besar. Dengan pendekatan yang lebih terorganisir, program-program penyuluhan dapat menjangkau lebih banyak individu dan komunitas, yang mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama di Kalimantan Tengah tidak hanya meningkatkan pemahaman agama yang lebih baik di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya penyuluh yang terlatih dan kelompok sasaran yang diberdayakan, terciptalah komunitas yang lebih inklusif

dan stabil, di mana umat beragama dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain.

Sasaran Kegiatan : 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	50	50	100% (Sangat Baik)
Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa	2	2	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama mencerminkan komitmen untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. Upaya ini melibatkan berbagai langkah strategis, seperti penguatan regulasi yang melindungi hak-hak kebebasan beragama, peningkatan kapasitas aparaturnya terkait, dan pembentukan mekanisme mediasi untuk mencegah serta menyelesaikan konflik berbasis agama. Selain itu, penyediaan fasilitas keagamaan yang memadai dan aman juga menjadi salah satu wujud konkret dalam memberikan perlindungan kepada umat beragama.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan perlindungan yang lebih baik. Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk melalui dialog antaragama dan sosialisasi nilai-nilai toleransi, membantu mencegah diskriminasi serta potensi konflik. Di era digital, pemanfaatan teknologi untuk melaporkan insiden yang mengancam kebebasan beragama juga meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap berbagai tantangan. Dengan pendekatan yang menyeluruh, peningkatan kualitas perlindungan umat beragama tidak hanya menjamin hak-hak dasar setiap individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Oleh karenanya pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai target 100% dalam tiga indikator utama Sasaran Kegiatan 2, yaitu: (1) persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, (2) jumlah aktor kerukunan yang dibina, dan (3) jumlah desa sadar kerukunan yang dibina. Pencapaian ini mencerminkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam menindaklanjuti 100% kasus pelanggaran hak beragama menunjukkan responsivitas dan efektivitas Kementerian Agama dalam menangani isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Langkah ini tidak hanya

memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi agama sebagai pelindung hak-hak konstitusional.

Selain itu, pembinaan terhadap 50 aktor kerukunan beragama menjadi strategi penting dalam memperkuat kapasitas individu yang memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Melalui pelatihan dan pendampingan, para aktor kerukunan ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik keagamaan di tingkat komunitas.

Pembinaan terhadap dua desa sadar kerukunan juga merupakan langkah konkret dalam membangun fondasi kerukunan di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan masyarakat desa dalam program-program kesadaran beragama dan toleransi, diharapkan tercipta lingkungan yang inklusif dan harmonis, serta menjadi model bagi desa-desa lain dalam membangun kerukunan umat beragama.

Secara keseluruhan, pencapaian 100% pada ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama. Upaya ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga memperkuat posisi Kementerian Agama sebagai lembaga yang responsif, inklusif, dan berkomitmen tinggi terhadap perlindungan hak-hak beragama masyarakat.

Dampak Positif

Pencapaian 100% pada tiga indikator utama Sasaran Kegiatan 2 menunjukkan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Dengan menindaklanjuti seluruh kasus pelanggaran hak beragama, Kementerian Agama memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak beragamanya dengan aman dan terlindungi. Hal ini meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama sebagai pelindung hak-hak dasar mereka.

Selain itu, pembinaan terhadap 50 aktor kerukunan beragama telah memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan yang dapat menjaga keharmonisan antarumat beragama. Melalui pelatihan dan pendampingan, para aktor ini kini lebih mampu mengatasi potensi konflik dan memfasilitasi dialog yang produktif antara berbagai kelompok agama, sehingga kerukunan di kalangan masyarakat semakin terjaga.

Program pembinaan desa sadar kerukunan juga berhasil menciptakan dua desa yang lebih inklusif dan harmonis, dengan masyarakat yang lebih peka terhadap

pentingnya toleransi beragama. Ini memberi dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang damai dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam membangun kerukunan.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan ini memperlihatkan bahwa Kementerian Agama telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama, yang tidak hanya berdampak pada perlindungan hak-hak individu, tetapi juga pada terciptanya masyarakat yang lebih stabil, harmonis, dan toleran. Capaian ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat beragama dan menciptakan kedamaian di Kalimantan Tengah.



Penguatan Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 di MAN Kota Palangka Raya

Sasaran Kegiatan : 3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	10	12	120% (Sangat Baik)
Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	14	16	115% (Sangat Baik)

Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa mencerminkan pentingnya kontribusi aktif mereka dalam menjaga harmoni sosial di

tengah keberagaman. Lembaga agama dan organisasi keagamaan berperan sebagai wadah pembinaan moral dan spiritual yang mendorong nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan gotong royong. Melalui berbagai program pembinaan, seperti dialog lintas agama, pendidikan berbasis inklusi, dan penyuluhan yang menekankan pada semangat kebangsaan, mereka membantu menghilangkan potensi konflik dan mempererat hubungan antarkomunitas.

Sementara itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral sebagai panutan yang dapat menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan persatuan. Dengan pengaruh mereka, tokoh-tokoh ini mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam situasi yang rawan terhadap perpecahan. Selain itu, inisiatif mereka dalam menciptakan ruang dialog, mediasi konflik, serta mendorong solidaritas sosial di tengah tantangan global semakin memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan sinergi yang baik antara lembaga, organisasi, dan tokoh-tokoh tersebut, bangsa Indonesia dapat terus menjaga stabilitas dan kebersamaan di tengah kompleksitas perbedaan yang ada.

Pada Indikator jumlah lembaga agama. Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi berupa bantuan operasional masing masing lembaga agama dan ormas keagamaan Bimbingan Masyarakat Islam yang diterima oleh

1. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'qn (LPTQ) Provinsi Kalimantan Tengah
2. Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (LASQI) Provinsi Kalimantan Tengah
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
4. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU)
5. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor
6. Pimpinan Wilayah Aisyiah

Sasaran Kegiatan : 4. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mencerminkan peran yang semakin strategis dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. FKUB sebagai wadah dialog dan kerja sama antaragama memiliki tanggung jawab untuk mencegah potensi konflik, membangun kesepahaman, serta

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan beragama yang damai dan harmonis.

Faktor Penguatan FKUB

1. Peningkatan Kapasitas dan Peran FKUB

- a. FKUB semakin aktif dalam memfasilitasi dialog lintas agama di berbagai daerah guna memperkuat toleransi dan saling pengertian.
- b. Keterlibatan FKUB dalam memberikan rekomendasi perizinan rumah ibadah semakin diperkuat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menghormati hak beribadah.
- c. FKUB berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan agama, dengan pendekatan musyawarah dan penyelesaian berbasis kearifan lokal.

2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

- a. Pemerintah semakin memperkuat peran FKUB melalui regulasi yang mendukung keberlanjutan dan efektivitasnya, termasuk alokasi anggaran dan pembinaan kelembagaan.
- b. Sinergi FKUB dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi keberagaman.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Generasi Muda

- a. FKUB semakin aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti seminar, dialog kebangsaan, dan program sosialisasi toleransi.
- b. Pelibatan generasi muda dalam kegiatan FKUB melalui program inklusif seperti kaderisasi pemuda lintas agama membantu memperkuat nilai-nilai moderasi beragama.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Media Digital

- a. FKUB memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan damai, mengatasi hoaks yang berpotensi memicu konflik, dan meningkatkan literasi keberagaman di masyarakat.
- b. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi untuk pelaporan dan penanganan kasus intoleransi juga semakin diperkuat.

Penguatan FKUB sangat penting dalam membangun ketahanan sosial berbasis keberagaman. Dengan sinergi yang lebih kuat antara FKUB, pemerintah, dan

masyarakat, diharapkan toleransi dan harmoni antarumat beragama dapat terus terjaga serta menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia.

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai 100% target peningkatan layanan Sekretariat Bersama (Sekber) FKUB melalui Bantuan Operasional (BOP). Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat peran FKUB sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat beragama di wilayah yang kaya akan keberagaman etnis dan agama.

Peningkatan layanan Sekber FKUB melalui BOP telah memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan dukungan operasional yang memadai, FKUB di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan strategis, seperti dialog antarumat beragama, sosialisasi moderasi beragama, dan mediasi konflik keagamaan. Hal ini berkontribusi pada terciptanya suasana harmonis dan toleran di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif FKUB dalam menjaga kerukunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan dari FKUB pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil dalam berkontribusi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah Kalteng.

Dampak Positif:

Dengan mencapai 100% pada peningkatan layanan Sekber FKUB melalui Bantuan Operasional (BOP) selama tahun 2024, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Peningkatan layanan ini berdampak positif dalam berbagai aspek, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Melalui berbagai program yang difasilitasi oleh FKUB, masyarakat semakin memahami pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik berbasis dialog yang difasilitasi FKUB menjadi semakin efektif dan inklusif, memungkinkan adanya ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama dalam mengatasi perbedaan. Ini berkontribusi pada pengurangan potensi konflik berbasis agama, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya rawan ketegangan antarumat beragama.

Dengan dukungan BOP, FKUB juga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan program-program penting, seperti pelatihan dan sosialisasi moderasi beragama, serta mediasi dalam konflik sosial yang melibatkan perbedaan keyakinan. Lebih jauh lagi, peningkatan layanan Sekber FKUB memungkinkan lembaga ini memberikan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih dilayani dan diakomodasi dalam upaya menjaga kerukunan. Hal ini juga menciptakan kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Agama, FKUB, dan masyarakat, dalam menjaga keharmonisan sosial dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Aktivitas yang dilakukan oleh FKUB membantu mencegah terjadinya konflik keagamaan, dengan menjaga perdamaian dan mempererat hubungan antarumat beragama.

Kementerian Agama, melalui dukungannya kepada FKUB, juga mendapatkan pengakuan atas keberhasilan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah, yang tercermin dalam penghargaan yang diterima dari berbagai pihak. Secara keseluruhan, peningkatan layanan Sekber FKUB melalui BOP telah memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan stabil di Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan bahwa penguatan FKUB melalui peningkatan layanan Sekber dan dukungan BOP merupakan langkah strategis dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah yang harmonis dan toleran.

Sasaran Kegiatan : 5. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	40	40	100% (Sangat Baik)
Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	14	14	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama mencerminkan upaya yang lebih terfokus untuk mempererat hubungan dan solidaritas di antara individu atau kelompok yang menganut agama yang sama. Pembinaan ini bertujuan untuk mengatasi potensi konflik internal yang timbul akibat perbedaan pemahaman, praktik, atau aliran dalam satu agama. Langkah-langkah strategis yang diambil meliputi penguatan dialog antar kelompok dalam satu agama, pelatihan toleransi internal, dan penyusunan pedoman yang mendukung keberagaman dalam

kesatuan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ajarannya tanpa adanya friksi internal.

Selain itu, program-program berbasis komunitas, seperti forum diskusi, seminar, dan kegiatan gotong royong yang melibatkan berbagai kelompok dalam satu agama, juga memainkan peran penting. Dengan memanfaatkan teknologi, platform digital kini digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan saling pengertian, sekaligus menjadi wadah diskusi yang lebih inklusif. Semua upaya ini tidak hanya meningkatkan rasa saling menghargai di antara kelompok-kelompok dalam satu agama, tetapi juga memperkuat fondasi persatuan di masyarakat, menjadikan umat lebih tangguh dan harmonis dalam menghadapi tantangan bersama.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam melalui kegiatan Dialog Ormas Keagamaan Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2024 menghimbau para penceramah termasuk penyuluh agama di Kalimantan Tengah untuk menyampaikan ajakan kepada umat atau jamaahnya agar menjaga pelaksanaan Pemilu dengan rukun dan damai. Para penceramah maupun penyuluh agama agar menjadi penggerak simpul-simpul kerukunan dan perdamaian menjelang pemilu. Terlebih lagi para penyuluh agama bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan mampu memberikan pesan moral yang positif kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu,



Dialog Ormas Keagamaan Islam

Sepanjang tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kerukunan intra umat beragama melalui berbagai program pembinaan yang strategis dan terukur. Upaya ini tercermin dari peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kalimantan Tengah yang mencapai 76,47, naik 0,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Bimas Hindu dalam apel internal Kanwil Kemenag Kalteng.

Peningkatan ini tidak terlepas dari pelaksanaan program-program pembinaan yang melibatkan tokoh agama, penyuluh, dan masyarakat lintas agama. Kegiatan seperti pelatihan moderasi beragama, dialog intra-agama, dan penguatan kapasitas penyuluh agama telah dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat nilai-nilai toleransi di kalangan umat seagama.

Selain itu, menjelang Pilkada Serentak 2024, sinergi antara Kemenag dan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dan dialog kerukunan umat beragama turut memperkuat stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik internal di tengah dinamika politik.

Dampak Positif:

1. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama: Kenaikan indeks KUB mencerminkan keberhasilan program pembinaan dalam memperkuat kerukunan intra umat beragama di Kalimantan Tengah.
2. Penguatan Kapasitas Aktor Kerukunan: Pelatihan dan pembinaan terhadap tokoh agama dan penyuluh meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola perbedaan dan mencegah potensi konflik internal.
3. Stabilitas Sosial Menjelang Pilkada: Kegiatan dialog dan silaturahmi antarumat beragama menjelang Pilkada membantu menciptakan suasana kondusif dan damai, mengurangi risiko konflik berbasis agama.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kerukunan intra umat beragama meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan.

Secara keseluruhan, upaya pembinaan kerukunan intra umat beragama yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2024 telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan siap menghadapi dinamika sosial-politik dengan bijak.

Sasaran Kegiatan : 6. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama mencerminkan peran strategis mereka dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan inklusivitas dalam kehidupan beragama. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas para penyuluh agama, baik melalui pelatihan yang komprehensif, penyediaan materi yang relevan, maupun pendampingan profesional. Penyuluh agama dilatih untuk menyampaikan ajaran agama dengan pendekatan yang seimbang, menghindari ekstremisme, serta mendorong sikap saling menghormati di tengah keragaman masyarakat. Hal ini menjadikan mereka agen penting dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat hubungan lintas kelompok agama.

Selain itu, penggunaan media digital dan teknologi informasi oleh penyuluh agama turut meningkatkan efektivitas pesan moderasi beragama. Dengan memanfaatkan platform online, penyuluh dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda, untuk menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya kedamaian, dialog, dan pengertian bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan penyuluh agama dalam menyebarkan moderasi, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan mampu merespons tantangan keberagaman dengan bijaksana.

Sebagai implementasi penguatan moderasi beragama dan mendukung pencapaian sasaran penguatan program moderasi beragama, telah terbentuk Kampung Moderasi Beragama kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 28 Desa. Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau bersama Penyuluh Agama Islam telah melaksanakan kegiatan Pengembangan Kampung Moderasi Beragama di Desa Garantung Kec. Maliku Kab. Pulang Pisau.





Sasaran Kegiatan : 7. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase rumah ibadah yang ramah	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	14	14	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran mencerminkan komitmen untuk menjadikan rumah ibadah tidak hanya sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran nilai-nilai agama yang inklusif dan damai. Pengelolaan ini mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, pelatihan bagi pengurus rumah ibadah untuk mempromosikan sikap toleransi, serta penyusunan program-program yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan pendekatan ini, rumah ibadah menjadi tempat yang menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan menghormati perbedaan.

Selain itu, rumah ibadah yang dikelola dengan baik dapat menjadi ruang dialog antarumat beragama dan tempat penyelenggaraan kegiatan lintas komunitas yang mempererat hubungan sosial. Melalui pemanfaatan teknologi, seperti platform digital untuk penyebaran pesan toleransi, serta keterlibatan aktif pemimpin agama dalam menyuarakan nilai-nilai universal, rumah ibadah dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dengan pengelolaan yang

profesional dan fokus pada syiar agama yang toleran, rumah ibadah bertransformasi menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di Indonesia, kebutuhan akan sarana rumah ibadah berupa masjid dan mushala semakin banyak dan tersebar diseluruh pelosok negeri. Dengan semangat untuk memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masjid, tentunya masjid-masjid tersebut perlu didorong untuk semakin professional pengelolaannya, moderat cara pandang ekosistemnya dan berdaya-memberdayakan jamaahnya.

Masjid ramah merupakan salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran pada tahun 2024 dengan Masjid Ramah.

Masjid Ramah adalah masjid maupun mushala yang kodisinya memenuhi kriteria-kriteria masjid yang ramah dalam lima kategori yaitu ramah anak dan perempuan, ramah difabel dan lansia, ramah lingkungan, ramah keragaman, serta ramah dhuafa dan musafir.

Kementerian Agama telah menggulirkan program Masjid Ramah untuk 2.000 masjid dan mushala pada tahun 2024. Bantuan tersebut mencakup dana senilai Rp 15 juta untuk masjid dan Rp 10 juta untuk mushala yang pengajuannya dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Pusaka Kemenag. Untuk provinsi Kalimantan Tengah terdapat 126 masjid dan mushala yang mendaftar, dengan rincian 69 masjid dan 57 mushala. Setelah dilakukan verifikasi berkas oleh tim Kanwil dan tim Kemenag RI, penerima yang memenuhi syarat administrasi dan layak untuk diberikan bantuan sebanyak 15, yaitu 11 masjid dan 4 mushala.

Selain itu, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam juga telah menggelar kegiatan Pembinaan Masjid Percontohan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat agar semangat dalam memberdayakan umat. Masjid Percontohan merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat atau pengurus masjid yang telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat.



Pembinaan Masjid Percontohan

**MASJID PERCONTOHAN TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

No.	Kategori Perlombaan	Nama Masjid	ID Masjid	Alamat Masjid
1.	Kategori Masjid Agung Percontohan	Baiturrahman	01.2.21.04.06.000004	Jl. Pelita Raya Buntok Kab. Barito Selatan
2.	Kategori Masjid Besar Percontohan	Sabilal Mujahidin	01.3.21.13.05.000001	Jl. Kapten Radeb Soesilo Rt. 03 RW. 01 Ampah Kota Kab. Barito Timur
3.	Kategori Masjid Jami' Percontohan	Nurul Huda	01.4.21.08.03.00.0004	Desa Bangun Jaya SP-3 Kec. Balai Riam Kab. Sukamara
4.	Kategori Masjid Bersejarah Percontohan	An-Nur	01.6.21.14.03.000009	Jl. Mahakam Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangka Raya
5.	Kategori Masjid Tempat Publik Percontohan	Nurul Yakin	01.2.21.07.01.000004	Diponegoro Kuala Pembuang II Kab. Seruyan
6.	Kategori Masjid Percontohan Rumah Anak dan Perempuan	KH Ahmad Dahlan	01.6.21.11.000036	Jl. Lintas Kalimantan (Simpang Bundaran Belah) Kel. Desa Anjir Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir
7.	Kategori Masjid Ramah Disabilitas dan Lansia	Aqidah	01.4.21.14.01.000019	Jl. Tambun Bungai No. 1 Palangka Raya
8.	Kategori Masjid Ramah Lingkungan	Al-Jabir	01.3.21.11.07.000004	Desa Jabiren Raya RT.06 Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau
9.	Kategori Masjid Ramah Keragaman	Al-Azhar	01.6.21.14.03.000036	Jl. Galaxy Raya Komp. Amaco No. 1A Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya
10.	Kategori Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir	Kubah Hijau Al-Abrar	01.4.21.14.04.000014	Jl. Mahir Mahar Km. 8 Kec. Sebangau Palangka Raya

Sasaran Kegiatan : 8. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan/konten	57	57	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik mencerminkan upaya aktif untuk menjadikan nilai-nilai agama lebih inklusif dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan ceramah, diskusi keagamaan, kampanye sosial berbasis nilai-nilai spiritual, hingga penggunaan media massa dan digital untuk menyampaikan pesan agama. Penyiaran agama yang dilakukan di ruang publik bertujuan untuk memperkuat moralitas, meningkatkan pemahaman agama, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis dan toleran.

Kegiatan ini juga didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas masyarakat untuk memastikan penyiaran agama tetap mengedepankan nilai-nilai moderasi dan menghormati keberagaman. Dengan memanfaatkan ruang publik secara bijak, seperti taman kota, auditorium, atau platform digital, penyiaran agama dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Pendekatan ini membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif, mempererat hubungan antar individu, serta mempromosikan agama sebagai kekuatan positif dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan penuh toleransi.



PRO 1

Ceramah Agama Islam

"Teman Chatting Adalah Mau"

Hari & Tanggal
Minggu u, 4 Agustus 2024

Pukul
05.15 - 05.45

Heldayani, S.H
Narasumber

Pro 1 RRI Palangka Raya FM 89,2
www.rri.co.id/RRI Digital

5:48:11

5:47:13

PRO 1

Mutiara Pagi

" Madrasah Terbaik adalah Keluarga"

Hari & Tanggal
Senin, 2 September 2024

Pukul
05.15 - 05.45 WIB

Ust.H.Muhammad Ansori,S.Sos.I,M.Pd
Narasumber

Setiar Seno
Penyiar

Pro 1 RRI Palangka Raya FM 89,2
www.rri.co.id/RRI Digital

TVRI
KALIMANTAN TENGAH

Ust. Ahmad Hanafi
Penceramah

Bulan Ramadhan

KALIMANTAN TENGAH DAPAT MENGGANTIKAN PESAWAT TELEVISI DENGAN TELEVISI YA! [@tvrikalteng](https://www.instagram.com/tvrikalteng)

Sasaran Kegiatan : 9. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	97	97	100% (Sangat Baik)
Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	97	97	100% (Sangat Baik)
Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	98,5	98.5	100% (Sangat Baik)
Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	97	97	100% (Sangat Baik)
Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	97	41.33	42.61% (Kurang)
Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	98,5	47.71	48.44% (Kurang)
Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	97	60	61.86% (Cukup)
Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	98,5	98.5	100% (Sangat Baik)
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	4	4	100% (Sangat Baik)
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	4	3	75% (Cukup)

Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama mencerminkan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan inklusivitas sejak dini dalam sistem pendidikan. Penyisipan konsep moderasi beragama dalam kurikulum bertujuan untuk membentuk generasi yang mampu memahami dan menghormati perbedaan, baik dalam internal agama maupun antaragama. Materi pembelajaran agama kini dirancang untuk lebih menekankan pada pentingnya hidup berdampingan secara damai, menghindari ekstremisme, dan memperkuat semangat kebangsaan tanpa mengorbankan keyakinan agama masing-masing.

Implementasi moderasi beragama dalam mata pelajaran agama juga didukung oleh pelatihan guru, pengembangan modul yang relevan, dan penyusunan metode pembelajaran interaktif. Melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi, siswa diajak untuk memahami situasi nyata yang membutuhkan sikap moderat dalam menghadapi keberagaman. Selain itu, dukungan teknologi, seperti penggunaan platform digital

untuk mengakses sumber belajar yang kaya akan perspektif toleransi, turut memperkaya proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, pendidikan agama tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman spiritual, tetapi juga membentuk individu yang mampu berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling menghormati.



Pembinaan moderasi beragama bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah umum yang digelar oleh Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Sasaran Kegiatan : 10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	95	100	105.26% (Sangat Baik)
Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	%	97	97	100% (Sangat Baik)

Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam mencerminkan kontribusi penting lembaga pendidikan keagamaan dalam membentuk pemahaman Islam yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada harmoni sosial. Pendidikan diniyah dan pesantren memiliki keunggulan sebagai pusat pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai agama secara mendalam, sekaligus membangun karakter santri yang terbuka terhadap keberagaman. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan ajaran Islam moderat dengan nilai-nilai kebangsaan, lembaga ini menjadi pilar penting dalam mencegah penyebaran paham radikal dan membangun masyarakat yang damai.

Upaya ini didukung dengan penguatan kapasitas pengajar, pembaruan metode pengajaran, serta penyusunan modul yang menekankan pentingnya sikap wasathiyah (moderat) dalam praktik beragama. Pesantren juga menjadi ruang untuk dialog antarindividu dan antarumat, membangun sikap kritis, dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pesantren dan pendidikan diniyah kini juga mampu menjangkau lebih banyak individu melalui platform digital, menyebarkan pesan-pesan Islam rahmatan lil alamin secara lebih luas. Peran strategis ini menjadikan pendidikan diniyah dan pesantren sebagai aktor kunci dalam membentuk generasi Muslim yang tidak hanya taat beragama tetapi juga berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran Kegiatan : 11. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Lokasi	15	15	100% (Sangat Baik)

Menguatnya dialog lintas agama dan budaya mencerminkan upaya strategis untuk memperkuat pemahaman, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Dialog lintas agama dan budaya berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam mengatasi kesalahpahaman, mengurangi potensi konflik, serta membangun hubungan yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan melibatkan tokoh agama, pemimpin budaya, dan komunitas lokal, dialog ini menjadi sarana untuk bertukar pandangan, menemukan titik kesamaan, dan menghormati perbedaan yang ada.

Pendekatan dialog ini sering kali diwujudkan melalui forum diskusi, lokakarya, seminar, hingga kegiatan berbasis komunitas, yang dirancang untuk mendorong kolaborasi antaragama dan antarkebudayaan. Dukungan dari pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil juga turut memperkuat pelaksanaan dialog lintas agama dan budaya. Selain itu, penggunaan media digital dan platform online telah memungkinkan dialog ini menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, termasuk generasi muda. Dengan mengedepankan komunikasi yang inklusif dan penuh empati, dialog lintas agama dan budaya berkontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, saling menghormati, dan bersatu dalam keberagaman.



Pembinaan moderasi beragama bagi asatidz pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah (PKPPS), pendidikan Al Qur'an dan madrasah diniyah takmiliyah yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam.

Pada tahun 2024, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menyelenggarakan 15 kegiatan dialog lintas agama dan budaya, mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat kerukunan umat beragama dan mempererat hubungan antarbudaya di wilayah yang dikenal dengan keberagaman etnis dan agama.

Kegiatan dialog tersebut tersebar di berbagai kabupaten/kota, melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat umum. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pulang Pisau menggelar dialog tokoh lintas agama untuk merawat kerukunan dan mensukseskan pilkada damai, dengan partisipasi aktif dari berbagai pemuka agama. Di Palangka Raya, kegiatan "Dialog Kerukunan Umat Beragama Bagi Generasi Muda Tahun 2024 Goes to School" diadakan untuk memperkuat toleransi sejak dini di kalangan pelajar.

Selain itu, kegiatan doa bersama lintas agama yang digelar oleh Kapolda Kalteng selama Safari Ramadan turut memperkuat semangat persatuan antarumat beragama. Gubernur Kalimantan Tengah juga mengadakan pertemuan dengan tokoh lintas agama, masyarakat, dan adat untuk membahas isu-isu strategis, termasuk pembangunan wisata religi.

Dampak Positif:

1. Penguatan Toleransi dan Kerukunan:

Dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat berhasil memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama, menciptakan suasana harmonis di tengah keberagaman.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam dialog menunjukkan peningkatan partisipasi dalam menjaga keharmonisan sosial.

3. Pendidikan Toleransi Sejak Dini:

Kegiatan yang menyasar generasi muda, seperti dialog di sekolah, membantu menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, membentuk karakter yang menghargai keberagaman.

4. Stabilitas Sosial Menjelang Pilkada:

Dialog yang difokuskan pada konteks pilkada membantu menciptakan suasana kondusif dan damai selama proses demokrasi berlangsung.

5. Peningkatan Citra Positif Daerah:

Upaya aktif dalam mempromosikan kerukunan dan toleransi meningkatkan citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan dialog lintas agama dan budaya di Kalimantan Tengah selama tahun 2024 telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kohesi sosial, menciptakan stabilitas, dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Sasaran Kegiatan : 12. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	28	18	64.29% (Cukup)

Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama mencerminkan upaya strategis untuk memadukan nilai-nilai spiritual dengan potensi budaya guna meningkatkan kesejahteraan umat. Produk budaya berbasis agama, seperti seni tradisional, kerajinan, kuliner, atau praktik budaya yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, dilihat tidak hanya sebagai warisan yang perlu dijaga, tetapi juga

sebagai aset ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat. Upaya pelestarian ini melibatkan dokumentasi tradisi, revitalisasi kearifan lokal, serta pemberdayaan komunitas dalam mengembangkan produk budaya yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Optimalisasi produk budaya berbasis agama juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan pengembangan jaringan pemasaran, termasuk memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional dan global. Dengan pendekatan ini, produk budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas keagamaan dan kebudayaan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kombinasi antara pelestarian dan optimalisasi ini pada akhirnya mendukung terciptanya kesejahteraan umat yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa.

Produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak), sebagai contoh Wisata Religi Islam:

1. Masjid Kyai Gede Kec. Kotawaringin Lama
2. Makam Kyai Gede Kec. Kotawaringin Lama
3. Istana Kuning Kota Pangkalan Bun
4. Astana Alnursari Kec. Kotawaringin Lama
5. Makam Syekh Abdul Hamid Ujung Pandaran
6. Makam Datu Tundai Palangka Raya
7. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya
8. Masjid Agung Kubah Kecubung Palangka Raya
9. Masjid Agung Baiturrahman Kota Buntok



Istana Kuning



Makam Kyai Gede



Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Sasaran Kegiatan : 13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Event	15	15	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud implementasi pengamalan nilai agama mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi bahwa ajaran agama mendukung sikap saling menghargai dalam keberagaman. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan, yang menjadi landasan untuk menerima perbedaan budaya sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Sikap ini diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti dialog lintas budaya, pendidikan tentang multikulturalisme, dan pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok budaya dalam semangat kebersamaan.

Penghormatan terhadap keragaman budaya juga terlihat dalam dukungan terhadap pelestarian tradisi lokal yang sering kali memiliki dimensi spiritual atau keagamaan, seperti seni tari, musik, ritual adat, dan kerajinan. Dengan mengakui keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa, masyarakat dapat lebih memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan sarana untuk saling melengkapi. Implementasi nilai agama yang mendorong penghormatan ini membantu membangun harmoni sosial, memperkuat solidaritas, dan menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas nasional tetapi juga menunjukkan komitmen dalam mengamalkan ajaran agama yang menghargai ciptaan-Nya dalam segala bentuk dan ragam.

Kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama pada Bimbingan Masyarakat Islam seperti : MTQ, STQ, MTQ KORPRI, PTQ RRI, LASQI, Kompetisi Film Pendek Islami, Festival Qasidah Rebana dan kegiatan keagamaan lainnya.



MTQ VII KORPRI Tk. Nasional Tahun 2024

Untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur'an bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus Nasional KORPRI memberikan kepercayaan dan menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 3 – 10 November 2024 di Palangka Raya. Pada penyelenggaraan MTQ VII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024 ini, Provinsi Kalimantan Tengah masuk jajaran 10 besar meraih peringkat 3 dengan total nilai 73.



Pagelaran Seni Budaya memperingati Tahun Baru Islam 1446 H/2024M



Kompetisi Film Pendek Islami

Sasaran Kegiatan : 14. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	KUA	2	2	100% (Sangat Baik)
Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	1	1	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama mencerminkan upaya yang intensif untuk menggali, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya yang memiliki akar kuat pada tradisi keagamaan. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap teks-teks keagamaan klasik, cerita rakyat, seni, ritual, hingga filosofi lokal yang bernafaskan ajaran agama. Dengan memperkuat literasi ini, masyarakat diajak untuk lebih mengenal dan menghargai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai spiritual, sekaligus menjaga kesinambungan tradisi tersebut di era modern.

Upaya peningkatan literasi ini melibatkan berbagai langkah, seperti penerbitan buku, digitalisasi manuskrip kuno, penyelenggaraan pameran, serta pelatihan dan lokakarya yang mengajarkan aspek budaya bernafas agama. Dengan dukungan teknologi, literasi ini juga diperkuat melalui platform online yang menyediakan akses luas ke sumber daya budaya dan keagamaan. Selain melestarikan kekayaan intelektual bangsa, peningkatan kualitas literasi ini juga berkontribusi dalam

pembentukan karakter masyarakat yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai agama. Hasilnya, generasi mendatang tidak hanya memahami warisan budaya mereka, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam membangun kehidupan yang harmonis dan beretika.

Untuk data sasaran kegiatan meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama bersumber dari data Simas Kantor Kemenag Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah. Diantara langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama, pemberian bantuan dana dari pusat untuk perpustakaan rumah ibadah dan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan rumah ibadah.

DATA PERPUSTAKAAN MASJID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Profil Perpustakaan Masjid			
	Kabupaten/Kota	Nama Masjid	Nama Perpustakaan	Alamat
1	Pulang Pisau	KH. Ahmad Dahlan	Taman Pustaka KH.Ahmad Dahlan	Jl. Lintas Kalimantan (Simpang Bundaran Belah) Kel. Desa Anjir Kec. Kahayan Hilir
2	Kapuas	Muhammadiyah Al Ihsan	Perpustakaan Masjid Muhammadiyah Al Ihsan	Jl. Melati No.55 Desa Selat Dalam Kec. Selat



Taman Pustaka KH. Ahmad Dahlan Pulang Pisau



Sasaran Kegiatan : 15. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	11	11	100% (Sangat Baik)
Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	3000	3080	102.67% (Sangat Baik)
Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	15	15	100% (Sangat Baik)
Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	8	8	100% (Sangat Baik)
Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	15	15	100% (Sangat Baik)
Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	Orang	20	20	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara nyaman dan optimal. Sarana pendukung ini mencakup berbagai fasilitas, seperti rumah ibadah yang lebih representatif, pusat pendidikan agama, perpustakaan keagamaan, serta infrastruktur digital untuk mendukung akses informasi dan pembelajaran agama. Dengan peningkatan kualitas sarana tersebut, pelayanan keagamaan menjadi lebih inklusif, efisien, dan mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

Upaya ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, termasuk pembangunan infrastruktur fisik yang ramah lingkungan dan aksesibel, serta pengadaan alat bantu seperti teknologi informasi untuk memperluas cakupan

pelayanan keagamaan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan relevansi sarana tersebut. Dengan kualitas sarana pendukung yang semakin baik, masyarakat tidak hanya dapat menjalankan aktivitas keagamaannya dengan lebih mudah, tetapi juga merasakan manfaat spiritual dan sosial yang lebih besar, sehingga mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan bermakna.

Pada Bidang Bimbingan Masyarakat Islam telah tersedia kitab suci Al Qur'an, Yassin, Juz'amma dan buku keagamaan lainnya yang berjumlah 850 buah, sebagian dari kitab suci dan buku keagamaan tersebut telah didistribusikan pula ke Bimas Islam Kabupaten /kota se Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Bimbingan Masyarakat Islam juga memberikan bimbingan layanan syariah berupa :

1. Hisab Rukyat 1 Ramadhan
2. Hisab Rukyat 1 Syawal
3. Hisab Rukyat 1 Dzulhijjah
4. Hisab Rukyat 1 Muharram
5. Pengelolaan Jadwal Shalat dan Imsakiyah
6. Layanan Kalibrasi Arah Kiblat
7. Layanan Rohaniawan
8. Pelayanan dan bimbingan teknis serta pembinaan di Bidang produk halal

Pada penentuan 1 Dzulhijjah 1445 H, tim Kanwil Kemenag Kalteng bersama unsur lembaga keagamaan, ormas Islam, BMKG Kelas I Tjilik Riwut dan PA Kota Palangka Raya melakukan pemantauan hilal atau rukyatul hilal yang bertempat di Menara Masjid Raya Darussalam, Kota Palangka Raya pada Jum'at 07 Juni 2024.



Rukyatul Hilal 1 Dzulhijjah 1445 H



Rukyatul Hilal 1 Dzulhijjah 1445 H

Tim Kalibrasi Arah Kiblat Kanwil Kemenag Prov, Kalteng juga telah melaksanakan pengukuran arah kiblat beberapa masjid, mushola maupun langgar, salah satu diantaranya pengukuran arah kiblat pembangunan mushola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mana nantinya akan menjadi tempat ibadah umat Islam yang diperuntukkan bagi pegawai maupun masyarakat umum, yang berurusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Tengah.



Sasaran Kegiatan : 16. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	24	24	100% (Sangat Baik)
Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	1	1	100% (Sangat Baik)
Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	7000	7000	100% (Sangat Baik)
Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	100	100	100% (Sangat Baik)
Jumlah Penghulu yang Dibina	Orang	125	125	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dalam Islam mencerminkan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan ketentuan syariat. Peningkatan ini meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pencatatan nikah online, hingga peningkatan kompetensi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan pendekatan ini, pelayanan nikah dan rujuk menjadi lebih efisien dan akuntabel, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas pernikahan sesuai hukum agama dan negara.

Selain itu, kualitas pelayanan juga ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas yang memadai di KUA, seperti ruang konsultasi yang nyaman, pelayanan bimbingan pranikah, dan edukasi terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Upaya ini tidak hanya membantu pasangan yang akan menikah atau rujuk untuk memenuhi syarat administratif, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman yang lebih

baik tentang kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dengan pelayanan yang semakin baik, diharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan nikah/rujuk meningkat, sekaligus mendukung tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu program yang dicanangkan Menteri Agama adalah Revitalisasi KUA, program ini merupakan upaya untuk mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat guna meningkatkan kualitas umat beragama.

4 Tujuan Revitalisasi KUA :

1. Meningkatkan kualitas umat beragama.
2. Memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan
3. Memperkuat program dan layanan keagamaan
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat keagamaan

Di Kalimantan Tengah ada 28 KUA yang direvitalisasi

No	Kabupaten/Kota	KUA	Kode KUA	Alamat
1	KOTAWARINGIN BARAT	Arut Selatan	6201021	Jl. Abdul Syukur
2	KOTAWARINGIN BARAT	Pangkalan Banteng	6201061	Jl. Kayu Mas Desa Simpang Berambai Kec. Pangkalan Banteng
3	KOTAWARINGIN TIMUR	Mentawa Baru Ketapang	6202061	Jl. DI. Panjaitan Nomor 5A – Sampit
4	KOTAWARINGIN TIMUR	Mentaya Hilir Utara	6202071	Jl. HM. Arsyad KM. 27 Desa Bagendang Hulu
5	KOTAWARINGIN TIMUR	Antang Kalang	6202101	Desa Tumbang Kalang RT.11 RW.004
6	KOTAWARINGIN TIMUR	Cempaga Hulu	6202131	Jl. Cilik Riwt KM. 87,5 Desa Pundu
7	KAPUAS	Kapuas Hilir	6203021	Jl. Bangdes II RT. 004 No 2 Kel Dahirang
8	KAPUAS	Pulau Petak	6203061	Sei Tatas Hilir RT. 001 No. 2 Sei Tatas
9	KAPUAS	Bataguh	6203171	Jl. Pematang Sawang Sei Lunuk – Bataguh
10	BARITO SELATAN	Karau Kuala	6204031	Jl. Barito Raya Bangkuang RT 23 RW 08

No	Kabupaten/Kota	KUA	Kode KUA	Alamat
11	BARITO SELATAN	Dusun Selatan	6204061	Jalan Pelita III No. 253 RT 33 Buntok
12	BARITO UTARA	Teweh Tengah	6205051	Jalan Yetro Sinseng
13	KATINGAN	Katingan Hilir	6206021	JL. SOEKARNO HATTA KOMP. PERKANTORAN KERENG HUMBANG
14	SERUYAN	Seruyan Hilir	6207011	Jl. DI Panjaitan Kuala Pembuang II
15	SERUYAN	Hanau	6207041	Jl. Akasia Desa Pembuang Hulu II
16	SERUYAN	Seruyan Hilir Timur	6207061	Jl. Putri Junjung Buih Desa Kartika Bhakti
17	SUKAMARA	Sukamara	6208011	Jl. Tjilik Riwut KM. 7 Desa Natai Sedawak Kec.Sukamara
18	GUNUNG MAS	Kurun	6210021	jl. Tjlik Riwut
19	PULANG PISAU	Banama Tingang	6211041	JL. Lintas Palangkaraya -Kuala Kurun desa Goha Kecamatan Banama Tingang Kab. Pulpis
20	PULANG PISAU	Kahayan Hilir	6211051	JL.LINTAS KALIMANTAN MENTAREN I
21	PULANG PISAU	Maliku	6211061	Jl. Lintas Bahaur No.1.A RT.13 Garantung Maliku
22	MURUNG RAYA	Murung	6212011	Jl. Veteran No.77 RT.005 RW.002 Kelurahan Beriwit
23	BARITO TIMUR	Dusun Tengah	6213051	Jalan Ampah “ Muara Teweh Km. 2
24	BARITO TIMUR	Pematang Karau	6213061	Jl. Ampah-Bontuk Km. 16 Bambulung
25	KOTA PALANGKARAYA	Pahandut	6271011	Jl. Setaji/Pandohop
26	KOTA PALANGKARAYA	Bukit Batu	6271021	Jl. Cilik Riwut Km. 31
27	KOTA PALANGKARAYA	Jekan Raya	6271031	Jl. Rinjani Bukit Hindu
28	KOTA PALANGKARAYA	Sabangau	6271041	Jl. Mahir Mahar/ Kalampangan

Untuk calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin Catin)

yang wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi berbagai persyaratan di KUA Kecamatan. Pada saat bimbingan perkawinan tersebut para calon pengantin akan dibimbing atau diberikan materi tentang : membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan ketahanan keluarga, dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi dan ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan.



Bimwin Catin Mandiri di KUA Kec. Katingan Hilir



Bimwin Catin Mandiri di KUA Kec. Pahandut



Bimwin Catin Mandiri bersama Tim Kesehatan Puskesmas di KUA Kec. Pahandut

Kemudian sebagai upaya mengkampanyekan pendewasaan usia perkawinan, menyikapi tingginya perkawinan usia dini dan perceraian pasangan muda, Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama bekerja sama dengan Biro Kesra Sekretariat Daerah Prov. Kalimantan Tengah telah menggelar kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah Tahun 2024 yang diikuti 100 peserta dari remaja usia sekolah.



Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah



Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam melalui APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) Prov. Kalimantan Tengah mengadakan Bimbingan Teknis Kepenghuluan Bagi PPPK Penghulu. Bimbingan teknis kepenghuluan ini menjadi salah satu kegiatan penguatan kinerja penghulu khususnya Penghulu ASN PPPK, yang mana tugas dan fungsi penghulu tidak hanya sebatas pada mengesahkan pernikahan, namun juga harus memiliki inovasi dalam melakukan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat.



Bimbingan Teknis Kepenghuluan Bagi PPPK Penghulu

Sasaran Kegiatan : 17. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Keluarga	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga mencerminkan upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan yang holistik, profesional, dan berbasis kebutuhan. Bimbingan keluarga ini bertujuan memberikan panduan kepada pasangan suami-istri, orang tua, dan anggota keluarga lainnya untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga, seperti pengelolaan konflik, komunikasi yang sehat, pendidikan anak, hingga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Peningkatan kualitas pelayanan ini mencakup pengembangan modul bimbingan yang relevan, peningkatan kompetensi para konselor atau fasilitator, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung.

Pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan bimbingan online, juga telah diterapkan guna menjangkau lebih banyak keluarga di berbagai wilayah. Program bimbingan keluarga kini sering dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, yang memperkuat aspek spiritual sebagai fondasi dalam membangun keluarga harmonis. Dengan pelayanan yang lebih baik, keluarga tidak hanya mendapat solusi atas masalah yang dihadapi tetapi juga memperoleh wawasan untuk membangun hubungan yang lebih kokoh, sehat, dan penuh kasih sayang. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera, toleran, dan harmonis.

Kegiatan Pusaka Sakinah merupakan upaya Ditjen Bimas Islam Kemenag dalam mentransformasikan KUA ke arah yang lebih baik melalui sinergi antara Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) ini merupakan program yang juga berfungsi memfasilitasi masyarakat mendapatkan konseling, mediasi pendampingan advokasi dan konsultasi, pencegahan kawin anak usia dini serta memberikan pencerahan tentang kesehatan reproduksi dan memperhatikan gizi keluarga.

Sasaran Kegiatan : 18. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan regulasi kepada jamaah. Upaya ini melibatkan pembaruan standar operasional penyelenggaraan, peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, penyelenggara diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih profesional dan transparan, sehingga meminimalkan potensi masalah yang dapat merugikan jamaah.

Selain itu, penggunaan teknologi digital juga diperkuat untuk mendukung sistem pemantauan, seperti pendaftaran online, pelaporan real-time, hingga sistem pengawasan berbasis data yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui saluran pengaduan yang efektif, sehingga jamaah dapat menyampaikan masukan atau keluhan terkait layanan yang diterima. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat, kualitas penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dapat terus meningkat, memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi jamaah, serta mencerminkan pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan umat.

Sasaran Kegiatan : 19. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	10	10	100% (Sangat Baik)
Persentase calon jamaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	2	0	0% (Kurang)

Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji mencerminkan upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses pendaftaran bagi calon jamaah haji. Pelayanan yang lebih baik ini diwujudkan melalui berbagai inovasi, seperti sistem pendaftaran online, integrasi data berbasis teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga terkait. Dengan sistem

yang terintegrasi secara digital, calon jamaah dapat mengakses informasi pendaftaran, jadwal, dan persyaratan dengan lebih mudah, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau kendala administratif.

Selain itu, pelayanan pendaftaran juga ditingkatkan dengan menyediakan pendampingan langsung bagi calon jamaah yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur pendaftaran, termasuk alur pembayaran dan informasi kuota, dilakukan secara masif untuk memastikan semua calon jamaah memahami prosesnya. Langkah-langkah ini tidak hanya membuat pelayanan pendaftaran lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan jamaah, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara lebih fokus untuk menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk.

Sasaran Kegiatan : 20. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji mencerminkan upaya untuk memberikan pengalaman yang nyaman, aman, dan mendukung kesiapan jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan fasilitas fisik seperti kamar yang lebih bersih dan nyaman, ruang makan yang memadai, hingga tempat ibadah yang representatif. Selain itu, penyediaan layanan kesehatan yang lengkap, seperti klinik dan tenaga medis yang siaga, menjadi prioritas untuk memastikan kesehatan jamaah terjaga selama masa persiapan di asrama.

Pelayanan di asrama haji juga diperkuat dengan peningkatan manajemen logistik, seperti penyediaan makanan bergizi, pengaturan transportasi yang efisien, serta layanan informasi yang jelas dan mudah diakses. Program pembinaan dan pendampingan, seperti manasik haji intensif, juga diselenggarakan untuk membantu jamaah memahami tata cara ibadah dan persiapan mental. Dengan dukungan teknologi, informasi terkait jadwal dan layanan di asrama dapat diakses secara real-time, sehingga memudahkan jamaah dan pengelola asrama dalam berkoordinasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepuasan jamaah, tetapi juga membantu mereka memulai perjalanan ibadah dengan lebih nyaman dan penuh persiapan.

Sasaran Kegiatan : 21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji	%	90	90	100% (Sangat Baik)
Persentase Petugas Haji yang Profesional	%	90	90	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji mencerminkan upaya untuk memastikan jamaah memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata cara ibadah haji, kesiapan fisik dan mental, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan selama perjalanan. Pembinaan ini melibatkan program-program yang lebih terstruktur, seperti manasik haji yang dilakukan secara intensif di tingkat kecamatan hingga kabupaten, serta materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah dari berbagai latar belakang.

Pelatihan ini mencakup aspek spiritual, teknis, dan kesehatan, seperti pemahaman rukun dan syarat haji, pengelolaan emosi, manajemen waktu, hingga tips menjaga stamina selama perjalanan. Penyampaian materi dilakukan oleh tenaga pembimbing yang profesional dan terlatih, dengan metode yang interaktif dan memanfaatkan teknologi digital, seperti video tutorial dan aplikasi pembinaan haji. Selain itu, pembinaan juga diperkuat dengan adanya pendampingan yang lebih personal bagi jamaah lanjut usia atau dengan kebutuhan khusus.

Dengan pembinaan yang berkualitas, jamaah diharapkan tidak hanya memahami esensi ibadah haji secara lebih baik tetapi juga mampu menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih khushyuk dan lancar. Hal ini juga meningkatkan rasa percaya diri jamaah, meminimalkan potensi kendala selama perjalanan, dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih bermakna.

Sasaran Kegiatan : 22. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu mencerminkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji. Sistem informasi haji terpadu dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek manajemen haji, seperti pendaftaran, pelatihan, kesehatan, keberangkatan, hingga pemulangan jamaah.

Dengan memanfaatkan teknologi digital dan basis data yang terpusat, sistem ini memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh jamaah, petugas haji, dan pihak terkait.

Fitur-fitur seperti pendaftaran online, pelacakan dokumen, sistem notifikasi, serta informasi real-time mengenai jadwal dan lokasi keberangkatan sangat membantu meminimalkan potensi kesalahan administratif dan meningkatkan kenyamanan jamaah. Selain itu, data yang dikelola secara terintegrasi memudahkan pemerintah dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti identifikasi kebutuhan khusus jamaah berdasarkan usia atau kondisi kesehatan. Dengan pengelolaan data yang lebih baik, komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait menjadi lebih efektif, sehingga seluruh rangkaian penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan lebih optimal, efisien, dan transparan.

Sasaran Kegiatan : 23. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase amil yang dibina	%	80	80	100% (Sangat Baik)
Persentase lembaga zakat yang dibina	%	95	95	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat mencerminkan upaya untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pengelolaan dana zakat yang lebih baik dilakukan melalui peningkatan tata kelola lembaga pengelola zakat (baznas atau laz), seperti penerapan standar akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pendistribusian serta pelaporan dana zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem pengumpulan zakat kini lebih mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui aplikasi mobile atau platform pembayaran online, sehingga dapat menjangkau lebih banyak muzaki (pemberi zakat).

Di sisi lain, pembinaan pemberdayaan dana zakat berfokus pada program-program yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Dana zakat digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, hingga pengembangan infrastruktur sosial yang berdampak jangka panjang bagi mustahik (penerima zakat). Pendekatan ini memastikan bahwa zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi. Dengan pengelolaan dan pembinaan yang lebih

profesional, zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Upaya meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Bantuan Operasional BAZNAS Provinsi dan 6 BAZNAS Kab/Kota
- b. Rapat Koordinasi Daerah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Koordinasi Pelaksanaan Program Akreditasi dan Audit Syariah
- d. Pendampingan dan Evaluasi Program Kampung Zakat
- e. Pendampingan KUA PEU (Pemberdayaan Ekonomi Umat)



Program pemberdayaan masyarakat melalui KUA dimaksudkan untuk mendorong muzaki berzakat. Terdapat 3 lokasi KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat di Provinsi Kalimantan Tengah (KUA Kec. Maluku, KUA Kec. Katingan Hilir dan KUA Kec. Pahandut). KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat ini merupakan program pendampingan dan penguatan akses pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga/komunitas yang berupa pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi umat, pendampingan usaha dan pembinaan rutin di 3 KUA oleh LAZ Nurul Fikri Palangka Raya.



Penyaluran 10 orang Penerima Manfaat dari Kementerian Agama pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan KUA PEU Kec. Katingan Hilir dan LAZ Nurul Fikri Palangkaraya.

Sasaran Kegiatan : 24. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase lembaga wakaf yang dibangun	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	16	16	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan aset wakaf mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik tidak hanya memastikan legalitas dan keberlanjutan wakaf,

tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kontribusi wakaf dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Dua indikator utama yang mencerminkan peningkatan ini adalah persentase lembaga wakaf yang dibina dan persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.

1. Persentase Lembaga Wakaf yang Dibina

Pembinaan terhadap lembaga wakaf bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan aset wakaf agar lebih profesional, transparan, dan produktif. Peningkatan ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

A. Peningkatan Kapasitas Nazhir (Pengelola Wakaf)

1. Pelatihan dan sertifikasi bagi nazhir agar memiliki pemahaman yang baik dalam pengelolaan aset wakaf secara syariah dan manajerial.
2. Penguatan tata kelola keuangan dan investasi wakaf agar lebih produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Penguatan Regulasi dan Pembinaan Lembaga Wakaf

1. Peningkatan koordinasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga wakaf untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai aturan.
2. Penyusunan pedoman teknis dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti wakaf tanah untuk usaha, pendidikan, atau kesehatan.

C. Digitalisasi Manajemen Wakaf

1. Penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pelaporan pengelolaan wakaf agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Pengembangan sistem data terintegrasi untuk mencatat perkembangan aset wakaf di berbagai daerah.

3. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan

Akta ikrar wakaf merupakan dokumen legal yang menegaskan status kepemilikan suatu aset sebagai wakaf, sehingga menjamin keberlanjutannya sebagai aset yang tidak dapat dialihkan atau dijual. Peningkatan jumlah akta ikrar wakaf mencerminkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dalam melindungi aset wakaf.

A. Kemudahan Proses Penerbitan Akta Ikrar Wakaf

1. Penyederhanaan prosedur administrasi dengan memanfaatkan layanan digital untuk mempercepat penerbitan akta.

2. Pelibatan Kantor Urusan Agama (KUA) dan notaris dalam mempercepat legalisasi ikrar wakaf.
- B. Sosialisasi dan Edukasi tentang Wakaf
1. Kampanye nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki akta ikrar wakaf.
 2. Pendekatan berbasis komunitas untuk mendorong lebih banyak individu dan lembaga melakukan wakaf secara resmi dan terdaftar.
- C. Penguatan Sistem Informasi dan Database Wakaf
1. Pembangunan sistem pendataan yang mencatat aset wakaf secara real-time guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi.
 2. Integrasi data wakaf dengan lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan wakaf yang lebih produktif.

Dampak Positif dari Penguatan Pengelolaan Aset Wakaf

1. Meningkatnya jumlah aset wakaf yang dikelola secara produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Memastikan status hukum wakaf yang lebih jelas dan terhindar dari sengketa kepemilikan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset wakaf.
4. Mendukung pengembangan ekonomi berbasis wakaf, seperti wakaf produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Peningkatan pengelolaan aset wakaf melalui pembinaan lembaga wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran wakaf bagi kesejahteraan umat. Dengan dukungan regulasi, teknologi, serta peningkatan kapasitas pengelola wakaf, aset wakaf dapat menjadi sumber daya yang lebih berdaya guna dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan pengelolaan aset wakaf maka Bidang Masyarakat Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan telah melakukan berbagai upaya berikut :

- a. Bantuan Operasional BWI Provinsi dan 6 BWI Kab/Kota
- b. Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
- c. Visitasi Kelembagaan Zakat dan Wakaf
- d. Penyediaan QRIS BARCODE WTC (Wakaf Tunai Catin) yang didistribusikan untuk KUA se Kalimantan Tengah. Hadirnya QRIS Wakaf Tunai di KUA bukan sekedar inovasi, tetapi juga ajakan untuk menanam kebaikan sejak awal

perjalanan rumah tangga. Dengan sistem yang lebih praktis dan mudah diakses, diharapkan semakin banyak pasangan yang menjadikan berbagi sebagai bagian dari komitmen pernikahan mereka.



Penyerahan QRIS WTC untuk KUA wilayah Kabupaten Katingan

Sasaran Kegiatan : 25. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	80	80	100% (Sangat Baik)
Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Madrasah	11	11.00	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan daya tarik pendidikan dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penerapan kurikulum yang lebih adaptif dan kontekstual memungkinkan integrasi nilai-nilai agama, budaya, dan sains

dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

Pola pembelajaran inovatif diterapkan melalui metode yang interaktif dan berbasis teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran kolaboratif, serta pemanfaatan platform digital untuk mendukung proses belajar. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam eksplorasi, analisis, dan penerapan pengetahuan. Selain itu, pendidik didorong untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi mereka dalam merancang dan menerapkan pola pembelajaran yang kreatif dan relevan. Upaya ini memastikan bahwa pendidikan menjadi lebih menarik, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.



Inovasi pembelajaran dengan menerapkan kurikulum yang berlaku di pondok pesantren, salah satunya dengan menggunakan teknologi informasi

Sasaran Kegiatan : 26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase guru madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai penetapan tunjangan	%	91	91	100% (Sangat Baik)
Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	82	82	100% (Sangat Baik)
Jumlah Penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	70	83	118.57% (Sangat Baik)
Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	%	70	70	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan mencerminkan upaya untuk memastikan proses evaluasi hasil belajar peserta didik lebih objektif, relevan, dan mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Penilaian pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan akademik, keterampilan praktis, sikap, dan karakter peserta didik secara holistik.

Peningkatan kualitas penilaian juga didukung oleh penggunaan teknologi digital, seperti platform ujian online dan aplikasi analitik, yang membantu proses penilaian menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, penerapan metode penilaian yang bervariasi, seperti portofolio, proyek, presentasi, dan asesmen berbasis performa, memberikan ruang bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam konteks yang lebih nyata. Dengan sistem penilaian yang lebih baik, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih konstruktif, membantu peserta didik untuk memahami kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi individu secara maksimal.

Sasaran Kegiatan : 27. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	98	98	100% (Sangat Baik)
Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	99	99	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem pembelajaran mencerminkan transformasi signifikan dalam cara pendidikan disampaikan dan diakses. Dengan integrasi TIK, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, fleksibel, dan inklusif, memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk berinteraksi secara lebih efektif tanpa batasan waktu dan tempat. Teknologi seperti platform pembelajaran daring, aplikasi manajemen kelas, dan alat konferensi video telah menghadirkan cara baru untuk menyampaikan materi, mengadakan diskusi, dan melakukan penilaian.

Pemanfaatan TIK juga memungkinkan penggunaan berbagai sumber belajar digital, seperti video pembelajaran, modul interaktif, dan simulasi, yang membuat

proses belajar lebih menarik dan mendalam. Selain itu, analitik data dari platform pembelajaran membantu pendidik untuk memantau kemajuan peserta didik secara real-time, memberikan umpan balik yang personal, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu. Dengan TIK, peserta didik juga didorong untuk mengembangkan literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan kolaborasi, yang menjadi kompetensi esensial di era digital. Penerapan TIK tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih modern, adaptif, dan berdaya saing global.



Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Dar Al Raudhah menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran di satuan pendidikan tersebut.

Sasaran Kegiatan : 28. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	75	100% (Sangat Baik)
Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	75	100% (Sangat Baik)
Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	75	100% (Sangat Baik)
Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	75	75	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, nyaman, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Peningkatan ini meliputi pembangunan dan renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya seperti ruang olahraga, asrama, dan kantin yang memadai. Selain itu, pengadaan peralatan pembelajaran modern, seperti perangkat teknologi informasi, alat peraga, dan fasilitas multimedia, turut memperkaya proses belajar-mengajar.

Fokus juga diberikan pada aksesibilitas fasilitas bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dengan menyediakan sarana ramah disabilitas seperti ramp, lift, dan perangkat bantu lainnya. Peningkatan kualitas ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi di sekolah dan kampus, serta ruang kelas virtual yang memungkinkan pembelajaran daring. Dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, peserta didik dan pendidik dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan lebih optimal, sehingga tercipta pengalaman belajar yang bermakna, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu secara maksimal. Hal ini pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peningkatan SPM sarana prasarana pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dilakukan di antaranya dengan menenuhi keperluan perangkat komputer untuk mendukung digitalisasi pembelajaran. Selain itu, perangkat komputer bagi PDF juga diperlukan dalam penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek.



Pemenuhan SPM sarana prasarana pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dilakukan dengan memenuhi perangkat komputer dan pembelajaran digital yang diperlukan oleh satuan pendidikan tersebut.

Sasaran Kegiatan : 29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa	80619	80619	100% (Sangat Baik)
Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah	Siswa	99,5	99,5	100% (Sangat Baik)
Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah	%	25	25	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan anak berbakat mencerminkan komitmen untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Bantuan ini bertujuan mengurangi kesenjangan pendidikan dengan memastikan bahwa anak-anak dari latar belakang ekonomi sulit, wilayah tertinggal, atau komunitas terpinggirkan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Bantuan tersebut diwujudkan melalui program beasiswa, subsidi biaya sekolah, pengadaan perlengkapan belajar, hingga pemberian akses ke fasilitas pendukung seperti asrama dan transportasi.

Untuk anak berbakat, bantuan ini juga mencakup program pengembangan potensi, seperti pelatihan khusus, pembimbingan intensif, dan kesempatan mengikuti kompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Bantuan pendidikan ini dikelola secara terarah, dengan memanfaatkan data dan teknologi untuk mendeteksi dan menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Dengan pendekatan ini, program bantuan tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga membuka peluang bagi anak-anak tersebut untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya ini pada akhirnya mendukung terciptanya pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.



Monitoring santri penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) pada pondok pesantren di Kalimantan Tengah.

Sasaran Kegiatan : 30. Meningkatnya kualitas penanganan ATS

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	50	50	100% (Sangat Baik)
Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	50	50	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) mencerminkan upaya strategis untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang layak, tanpa terkecuali. Penanganan ATS berfokus pada identifikasi faktor penyebab putus sekolah, seperti kendala ekonomi, masalah sosial, atau akses geografis, dan menyediakan solusi yang tepat sasaran. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kembalinya ATS ke bangku sekolah.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemberian beasiswa, penyediaan fasilitas belajar alternatif seperti sekolah kejar paket atau pendidikan informal, serta pelaksanaan program pemberdayaan keluarga agar mampu mendukung pendidikan anak. Pemanfaatan teknologi digital juga diterapkan, seperti melalui platform pembelajaran daring yang memungkinkan anak-anak dari daerah terpencil atau dalam kondisi khusus tetap bisa belajar. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi kendala teknis tetapi juga membantu membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat. Dengan penanganan yang berkualitas, ATS tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tetapi juga memperoleh

keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah.



Diskusi bersama salah satu pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mengetahui tingkat anak tidak sekolah (ATS) yang mengikuti program kesetaraan di pondok pesantren.

Sasaran Kegiatan : 31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Siswa	7789	7789	100% (Sangat Baik)

Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah mencerminkan komitmen untuk memberikan fondasi pendidikan yang lebih kuat bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. Program ini bertujuan memastikan anak-anak usia prasekolah mendapatkan stimulasi perkembangan yang optimal, baik dalam aspek kognitif, emosional, sosial, maupun fisik. Pelayanan ini melibatkan pendekatan yang holistik dan berbasis pada kebutuhan anak, seperti pengenalan dasar literasi dan numerasi, pengembangan keterampilan motorik, serta pembentukan karakter melalui aktivitas bermain dan belajar yang menyenangkan.

Untuk mendukung program ini, peningkatan kualitas tenaga pendidik prasekolah menjadi prioritas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Selain itu, penyediaan fasilitas yang ramah anak, seperti ruang kelas yang aman, alat permainan edukatif, dan kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, juga menjadi bagian dari penguatan layanan ini. Kolaborasi antara pemerintah,

lembaga pendidikan, dan orang tua turut memastikan bahwa pelayanan prasekolah ini dapat diakses secara merata, termasuk bagi anak-anak di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu. Dengan pelayanan prasekolah yang lebih baik, anak-anak dipersiapkan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya dengan kemampuan dasar yang kokoh, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam pendidikan dan kehidupan di masa depan.

Sasaran Kegiatan : 32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	%	99	95	95.96% (Baik)
Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	99,5	99.5	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan mencerminkan upaya untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan dedikasi para pelaku pendidikan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan ini melibatkan berbagai program pelatihan dan pengembangan, seperti sertifikasi profesi, pelatihan berkelanjutan, dan pemberian akses ke sumber belajar modern. Melalui program ini, pendidik dibekali dengan metode pengajaran inovatif, pemahaman tentang kurikulum terkini, serta kemampuan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

Selain pendidik, tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas, dan staf administratif juga mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan penggunaan sistem digital. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh elemen pendidikan dapat bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Dukungan berupa insentif, pengakuan atas prestasi, serta peningkatan kesejahteraan juga menjadi bagian dari strategi untuk memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan agar memberikan kontribusi terbaik mereka.

Dengan meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan

kebutuhan peserta didik. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa tetapi juga memperkuat peran pendidikan sebagai pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif.



Pembinaan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum yang diselenggarakan di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

Sasaran Kegiatan : 33. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	99,5	99.5	100% (Sangat Baik)
Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	99	79	79.80% (Cukup)

Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal mencerminkan langkah strategis untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang cukup dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas. Pemenuhan ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan distribusi tenaga pendidik di berbagai daerah, khususnya wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T), serta memastikan rasio guru terhadap siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini meliputi perekrutan guru secara berkelanjutan, redistribusi guru dari daerah dengan kelebihan tenaga pendidik ke wilayah yang kekurangan, serta optimalisasi sistem penempatan tenaga kependidikan berbasis kebutuhan. Selain itu, penguatan sistem insentif, seperti tunjangan daerah

khusus, juga diberikan untuk mendorong guru agar bersedia bertugas di lokasi yang kurang diminati.

Dengan terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai standar minimal, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih efektif dan inklusif. Hal ini tidak hanya memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang memadai, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan, mendukung pemerataan akses pendidikan, dan mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul di seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran Kegiatan : 34. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	99,5	99,5	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik mencerminkan komitmen untuk menciptakan tenaga pendidik yang kompeten, profesional, dan mampu menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan modern. Upaya ini berfokus pada peningkatan jenjang kualifikasi akademik guru, seperti mendorong guru untuk meraih gelar sarjana (S1) atau pascasarjana (S2), serta mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat utama untuk menjadi pendidik yang terstandarisasi.

Program ini mencakup pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sehingga guru tidak hanya memiliki pemahaman mendalam terhadap materi ajar, tetapi juga mampu menyampaikan pembelajaran secara efektif, relevan, dan menarik. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi dan inovasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas ini, memastikan guru mampu mengintegrasikan metode pembelajaran yang modern dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.

Peningkatan kualifikasi pendidik juga didukung oleh skema insentif, seperti bantuan biaya pendidikan, beasiswa, dan pengakuan atas prestasi, untuk mendorong guru meningkatkan kualifikasi mereka. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru, proses pembelajaran di kelas diharapkan menjadi lebih berkualitas, efektif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara maksimal.

Hal ini pada akhirnya mendukung tujuan pendidikan nasional dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing global.

Untuk mencapai target guru pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah umum yang mengikuti PPG, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam mendorong para guru untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Upaya ini mencapai hasil yang memuaskan karena direpon positif oleh Pemkab/Pemkot dan Baznas di Kalimantan Tengah.



Pengukuhan guru professional setelah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) bagi guru pendidikan agama Islam (PAI).

Sasaran Kegiatan : 35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadallah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	50	50	100% (Sangat Baik)

Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi mencerminkan komitmen untuk meningkatkan standar mutu lembaga pendidikan secara lebih cepat dan merata. Akreditasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga proses pembelajaran. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem akreditasi, baik melalui penyediaan sumber daya yang memadai maupun pengembangan mekanisme penilaian yang lebih efektif dan efisien.

Akselerasi akreditasi dilakukan melalui penyederhanaan proses administrasi, pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penilaian, serta pelatihan bagi asesor

akreditasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan pendekatan ini, lembaga pendidikan dapat lebih mudah diakses untuk dievaluasi secara objektif dan transparan, sehingga mendorong percepatan peningkatan mutu. Selain itu, program pendampingan bagi lembaga yang belum terakreditasi atau memiliki nilai akreditasi rendah juga diperkuat untuk membantu mereka memenuhi standar yang diperlukan. Dengan menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat meningkat, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, serta memastikan bahwa setiap siswa memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan standar nasional. Hal ini juga mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif, merata, dan berdaya saing global.

Sasaran Kegiatan : 36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	100	76	76% (Cukup)

Meningkatnya budaya mutu pendidikan mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi di semua elemen pendidikan-pendidik, peserta didik, pengelola sekolah, dan masyarakat akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Budaya mutu mengacu pada komitmen kolektif untuk menjadikan kualitas sebagai fokus utama dalam seluruh aspek pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Peningkatan budaya mutu pendidikan dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti pengembangan standar operasional yang jelas, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penerapan sistem penjaminan mutu internal di lembaga pendidikan. Selain itu, penguatan peran komunitas sekolah, seperti keterlibatan orang tua dan masyarakat, dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif juga menjadi bagian penting. Pemanfaatan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan berbasis bukti turut memperkuat budaya mutu ini.

Dengan meningkatnya budaya mutu, seluruh komponen pendidikan terdorong untuk terus melakukan inovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai hasil yang optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Sasaran Kegiatan : 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase kepala pendidikan diniyah/muadallah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya budaya belajar dan terciptanya lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa institusi pendidikan menjadi tempat yang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Budaya belajar yang positif ditandai dengan semangat belajar yang tinggi di kalangan siswa dan guru, interaksi yang harmonis, serta aktivitas pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan ini meliputi penerapan metode pembelajaran yang kreatif, pengembangan kurikulum berbasis proyek, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong eksplorasi minat dan bakat siswa. Selain itu, upaya pencegahan kekerasan dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang disampaikan melalui program bimbingan konseling, pendidikan karakter, serta pelatihan pengelolaan emosi bagi siswa dan guru.

Lingkungan yang bebas dari kekerasan juga didukung oleh kebijakan yang tegas terhadap tindakan bullying dan bentuk kekerasan lainnya, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Dengan menciptakan budaya belajar yang menyenangkan dan lingkungan yang aman, siswa dapat belajar dengan lebih fokus, guru dapat mengajar dengan lebih efektif, dan sekolah/madrasah dapat menjadi

tempat yang mendukung tercapainya prestasi akademik sekaligus kesejahteraan emosional bagi seluruh komunitasnya.



Pembinaan di satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Dar Al Raudhah untuk mendorong pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran, budaya belajar yang aman dan nyaman, serta penerapan pesantren ramah anak.

...

Sasaran Kegiatan : 38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	madrasah	150	148	98.67% (Baik)
Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	gugus	527	527	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda serta pengembangan pendidikan kepramukaan mencerminkan upaya untuk membentuk generasi muda yang berjiwa kepemimpinan, tangguh, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan kepramukaan, sebagai bagian integral dari pembinaan karakter, memberikan ruang bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerja sama, dan kemandirian melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai disiplin, keberanian, dan solidaritas.

Peningkatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan kepramukaan yang lebih terstruktur, program latihan keterampilan berbasis komunitas, serta pembentukan kelompok-kelompok pramuka yang aktif di sekolah dan masyarakat.

Selain itu, pelibatan pemuda dalam kegiatan sosial, seperti tanggap bencana, aksi lingkungan, dan program pengabdian masyarakat, memperkuat semangat kesukarelawanan dan memperluas kontribusi mereka dalam membangun bangsa.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pelatihan berbasis teknologi, dan penguatan jejaring antarorganisasi kepemudaan, pendidikan kepramukaan tidak hanya menjadi sarana pengembangan karakter, tetapi juga wadah untuk mengasah kemampuan kepeloporan yang relevan di era modern. Upaya ini diharapkan melahirkan pemuda yang tidak hanya tangguh secara pribadi tetapi juga memiliki semangat kolektif untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

Sasaran Kegiatan : 39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang kurang mampu atau rentan, memiliki akses terhadap keadilan yang setara. Peningkatan ini melibatkan perbaikan pada aspek layanan hukum, seperti kemudahan akses, kecepatan proses, dan transparansi dalam penanganan kasus hukum. Layanan ini mencakup pendampingan hukum dalam berbagai isu, mulai dari perkara pidana, perdata, hingga sengketa administratif.

Bantuan hukum yang lebih berkualitas juga diwujudkan melalui penguatan kapasitas para advokat dan konsultan hukum, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun sertifikasi profesional. Selain itu, penyediaan layanan berbasis teknologi, seperti platform online untuk konsultasi hukum dan pelaporan kasus, mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan hukum tanpa harus menghadapi kendala geografis atau administratif.

Upaya ini juga didukung oleh program penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum. Dengan layanan dan bantuan hukum yang lebih baik, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi, berpartisipasi aktif dalam

penyelesaian kasus hukum mereka, dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara merata dan inklusif.

Sasaran Kegiatan : 40. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase rekomendasi izin orang asing	%	5	5	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pengelolaan kerja sama luar negeri dalam hal persentase rekomendasi izin orang asing mencerminkan upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses pengelolaan izin bagi warga negara asing yang ingin bekerja, belajar, atau berkontribusi di Indonesia. Peningkatan ini berfokus pada penguatan prosedur administrasi, penyederhanaan alur pengajuan izin, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kelengkapan dan validitas dokumen pendukung.

Pengelolaan ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi berbasis daring yang memungkinkan pemrosesan rekomendasi izin dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan sistem yang lebih modern, koordinasi antara lembaga terkait, seperti kementerian dan instansi pemerintah, menjadi lebih efektif, sehingga proses evaluasi dan pemberian rekomendasi izin dapat dilakukan sesuai dengan standar dan kebutuhan strategis negara.

Selain itu, kebijakan yang mendukung kerja sama luar negeri, seperti pengutamaan izin bagi tenaga ahli, mahasiswa, atau pelaku usaha yang memiliki kontribusi signifikan bagi pembangunan Indonesia, juga menjadi bagian dari upaya ini. Dengan pengelolaan yang lebih berkualitas, proses pemberian rekomendasi izin orang asing tidak hanya lebih efisien tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kepentingan nasional dan penguatan kerja sama internasional.

Sasaran Kegiatan : 41. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	90	90	100% (Sangat Baik)
Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	85	85	100% (Sangat Baik)

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	70	70	100% (Sangat Baik)
Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	60	60	100% (Sangat Baik)
Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	70	70	100% (Sangat Baik)
Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	84	84	100% (Sangat Baik)
Persentase data ASN yang diupdate	%	95	95	100% (Sangat Baik)
Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	79	79	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aspek pengadaan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan pegawai mencerminkan upaya untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Pengelolaan yang lebih baik dimulai dari tahap pengadaan, di mana proses seleksi dilakukan secara transparan, berbasis meritokrasi, dan menggunakan sistem berbasis teknologi seperti Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin objektivitas dalam penilaian.

Setelah pengadaan, penempatan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi, sehingga pegawai ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah. Selain itu, pembinaan pegawai dilakukan secara terarah melalui program pelatihan, mentoring, dan coaching yang berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan.

Pengembangan pegawai juga menjadi prioritas dengan memberikan peluang peningkatan karier yang adil, seperti promosi berdasarkan kinerja, pendidikan lanjutan, dan pelibatan dalam proyek strategis. Teknologi informasi digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pengelolaan yang berkualitas, ASN diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sasaran Kegiatan : 42. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	laporan	95	95	100% (Sangat Baik)
Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	97	97	100% (Sangat Baik)
Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	99	99	100% (Sangat Baik)
Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan mencerminkan komitmen untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan ini melibatkan penerapan sistem yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Langkah-langkah peningkatan ini meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem akuntansi berbasis teknologi, serta pengawasan yang lebih ketat oleh pihak internal maupun eksternal. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti Web Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Monitoring SAKTI (MonSAKTI), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) atau aplikasi/web serupa, mempermudah pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, monitoring, pengendalian, pengawasan, rekonsiliasi, pelaporan, evaluasi transaksi keuangan negara dan memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara tepat waktu, sesuai standar, akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, evaluasi rutin dan audit independen dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan bebas dari penyimpangan. Sosialisasi peraturan keuangan kepada seluruh unit kerja juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Dengan pengelolaan keuangan yang tertib, instansi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, mencegah terjadinya penyalahgunaan dana, serta memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan terpercaya.

Beberapa penghargaan yang didapatkan di Tahun 2024 diantaranya untuk Koordinator Tingkat Wilayah penghargaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2023 dari Kanwil DJPB Prov Kalteng : Peringkat I kategori UAPPA-W Sedang Ditjen Bimas Katolik dan Peringkat II kategori UAPPA-W Kecil Ditjen Bimas Buddha.



Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah Wawan Juswanton yang diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Kalteng dan Ketua Tim Keuangan

Penghargaan lain berupa Kategori Penilaian Kinerja Belanja Modal Non Jalan-Jaringan TA 2024 oleh Kepala KPPN Palangka Raya kepada Kanwil Kementerian Agama Prov.Kalimantan Tengah (418760) Tahun 2024.



Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Kepala KPPN Palangka Raya Indra Karunia Dewanti yang diterima oleh Ketua Tim Keuangan

Sasaran Kegiatan : 43. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	95	95	100% (Sangat Baik)
Persentase tanah yang bersertifikat	%	100	100	100% (Sangat Baik)
Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	%	95	95	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan aset negara dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan ini bertujuan memaksimalkan nilai dan manfaat BMN bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya

Peningkatan ini berfokus pada penetapan status penggunaan BMN secara tepat, sehingga setiap aset negara memiliki kejelasan fungsi dan pemanfaatannya. Proses ini melibatkan inventarisasi menyeluruh, verifikasi dokumen, dan analisis kebutuhan operasional instansi. Dengan langkah ini, aset negara dapat digunakan secara produktif, baik untuk mendukung operasional instansi maupun memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan oleh pihak ketiga.

2. Persentase tanah yang bersertifikat

Peningkatan ini bertujuan memastikan legalitas kepemilikan tanah yang dimiliki negara, sehingga terhindar dari potensi sengketa. Proses percepatan sertifikasi tanah dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pendaftaran serta pemantauan proses sertifikasi. Sertifikat ini menjadi dokumen hukum yang menjamin perlindungan aset negara sekaligus meningkatkan nilai keuangan tanah dalam neraca BMN.

3. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN

Opname Physic (OP) BMN merupakan kegiatan pencatatan fisik aset secara berkala untuk memastikan kesesuaian data antara pencatatan administratif dan kondisi riil di lapangan. Peningkatan persentase nilai OP BMN menunjukkan peningkatan akurasi dan validitas data aset negara. Proses ini didukung dengan teknologi inventarisasi, seperti aplikasi digital berbasis barcode atau QR code, untuk mempermudah pendataan dan pelaporan kondisi fisik aset.

Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel, pemerintah tidak hanya mampu memaksimalkan manfaat BMN tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola aset negara yang transparan dan bertanggung jawab. Hal ini juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya negara dan optimalisasi potensi aset untuk mendukung pembangunan nasional.

Sasaran Kegiatan : 44. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	75	75	100% (Sangat Baik)
Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	80	80	100% (Sangat Baik)
Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	80	80	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi mencerminkan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di dalam satuan organisasi/kerja. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Fokus utama peningkatan ini terlihat pada beberapa indikator utama:

1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis

Penetapan dan evaluasi SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis bertujuan untuk menyelaraskan setiap kegiatan operasional organisasi dengan alur kerja yang dirancang secara strategis. Dengan menyusun SOP berbasis peta proses bisnis, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tahapan kerja berjalan sesuai standar yang telah ditentukan, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Evaluasi rutin terhadap SOP memastikan prosedur yang ada tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan operasional.

2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi

Evaluasi laporan kinerja satuan organisasi menjadi langkah penting untuk mengukur sejauh mana tujuan dan target kerja telah tercapai. Proses ini melibatkan analisis data kinerja, identifikasi hambatan, dan rekomendasi perbaikan untuk periode mendatang. Peningkatan persentase laporan yang

dievaluasi menunjukkan komitmen organisasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Menindaklanjuti administrasi hasil pengawasan menunjukkan keseriusan organisasi dalam memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama proses audit atau pengawasan. Tindak lanjut ini meliputi perbaikan kebijakan, penyempurnaan prosedur, hingga penyelesaian temuan spesifik. Peningkatan persentase ini mencerminkan efektivitas pengawasan dalam mendorong akuntabilitas dan peningkatan kualitas manajemen organisasi.

Dengan penataan dan penguatan manajemen yang lebih berkualitas, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat kepercayaan publik, dan mencapai kinerja yang lebih baik dalam mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Dampak positif

Pelaksanaan kegiatan penataan dan penguatan manajemen organisasi sepanjang tahun 2024 telah memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola internal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis peta proses bisnis di 75% satuan kerja telah mendorong terciptanya sistem kerja yang lebih terstruktur, seragam, dan efisien. Hal ini secara langsung memperkuat koordinasi lintas unit serta meminimalisasi potensi duplikasi dan tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Evaluasi atas 80% laporan kinerja satuan organisasi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan keselarasan antara pelaksanaan program dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data dan perbaikan perencanaan ke depan.

Lebih lanjut, tingginya persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan (80%) menunjukkan komitmen satuan kerja terhadap pembenahan internal, serta memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola. Kondisi ini mendorong tumbuhnya mekanisme *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) di lingkungan kerja, serta meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi audit maupun penilaian eksternal secara lebih transparan dan sistematis.

Secara keseluruhan, capaian pada sasaran ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas manajemen organisasi menuju birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil.

Sasaran Kegiatan : 45. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	90	90	100% (Sangat Baik)
Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	satker	35	35	100% (Sangat Baik)
Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	orang	35	35	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi mencerminkan kemajuan dalam upaya menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas ini terlihat melalui berbagai aspek utama:

1. Perbaikan Tata Kelola Organisasi

Organisasi pemerintah di tata ulang untuk menghilangkan tumpang tindih fungsi, meningkatkan efisiensi alur kerja, dan memastikan bahwa struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Hal ini didukung dengan penerapan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur.

2. Peningkatan Kompetensi dan Integritas ASN

Reformasi birokrasi juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sistem rekrutmen berbasis meritokrasi. Selain itu, penerapan sistem penilaian kinerja yang transparan dan pemberian insentif berbasis hasil mendorong ASN untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi lebih responsif melalui inovasi digital, seperti sistem pelayanan terpadu berbasis elektronik (e-government), yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Penekanan pada transparansi dalam pelayanan juga mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan

Reformasi birokrasi memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Evaluasi kinerja yang rutin dilakukan membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, sehingga birokrasi dapat terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

5. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja

Dengan fokus pada hasil, reformasi birokrasi mendorong terciptanya budaya kerja yang menekankan pencapaian target yang nyata dan berdampak langsung. Hal ini dilakukan melalui evaluasi rutin, penghargaan atas pencapaian, dan pembinaan untuk peningkatan kinerja.

Dengan kualitas penerapan reformasi birokrasi yang semakin baik, birokrasi Indonesia diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pembangunan yang efektif, memberikan pelayanan publik yang prima, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdaya saing global.

Jadi Selama tahun 2024, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mencapai 100% target pada seluruh indikator sasaran kegiatan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi, yaitu melalui tercapainya evaluasi implementasi RB pada 90% satuan kerja, pembinaan Zona Integritas pada 35 satker, serta pembinaan 35 agen perubahan, yang secara kuantitatif menunjukkan kinerja sangat baik, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek kualitas hasil evaluasi, efektivitas pembinaan menuju WBK/WBBM, serta optimalisasi peran agen perubahan dalam mendorong transformasi budaya kerja di lapangan.

Dampak positif

Pencapaian 100% target pada seluruh indikator kegiatan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi selama tahun 2024 memberikan dampak positif yang signifikan bagi penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pada 90% satuan kerja berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja aparatur, sekaligus mendorong penerapan sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pembinaan terhadap 35 satuan kerja dalam rangka penguatan Zona Integritas telah memperkuat budaya kerja berintegritas serta membangun pondasi bagi satuan kerja dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembinaan terhadap 35 agen perubahan juga memberikan dampak positif dalam membentuk figur-figur internal yang mampu menjadi role model dan motor penggerak reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja. Agen perubahan berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas, pelayanan prima, dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja masing-masing.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi sepanjang tahun 2024 telah menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.

Sasaran Kegiatan : 46. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	95	95	100% (Sangat Baik)
Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	85	106.25% (Sangat Baik)
Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	75	80	106.67% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran mencerminkan upaya untuk memastikan proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar lebih terintegrasi, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Langkah-langkah utama dalam peningkatan ini meliputi:

1. Penguatan Perencanaan Berbasis Data

Proses perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan dan data yang akurat, sehingga kebijakan dan program yang dirancang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-planning, memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan terukur.

2. Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran

Kualitas perencanaan ditingkatkan dengan memastikan bahwa anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencegah adanya pemborosan atau duplikasi anggaran, sehingga setiap alokasi dana memiliki dampak yang maksimal.

3. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting)

Anggaran dirancang untuk mendukung pencapaian hasil yang terukur. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara berkala.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Perencana dan Pengelola Anggaran

Pelatihan dan pendampingan diberikan kepada para perencana dan pengelola anggaran untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun rencana dan anggaran yang strategis dan akuntabel.

5. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi

Sistem pengawasan internal dan eksternal diperkuat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan.

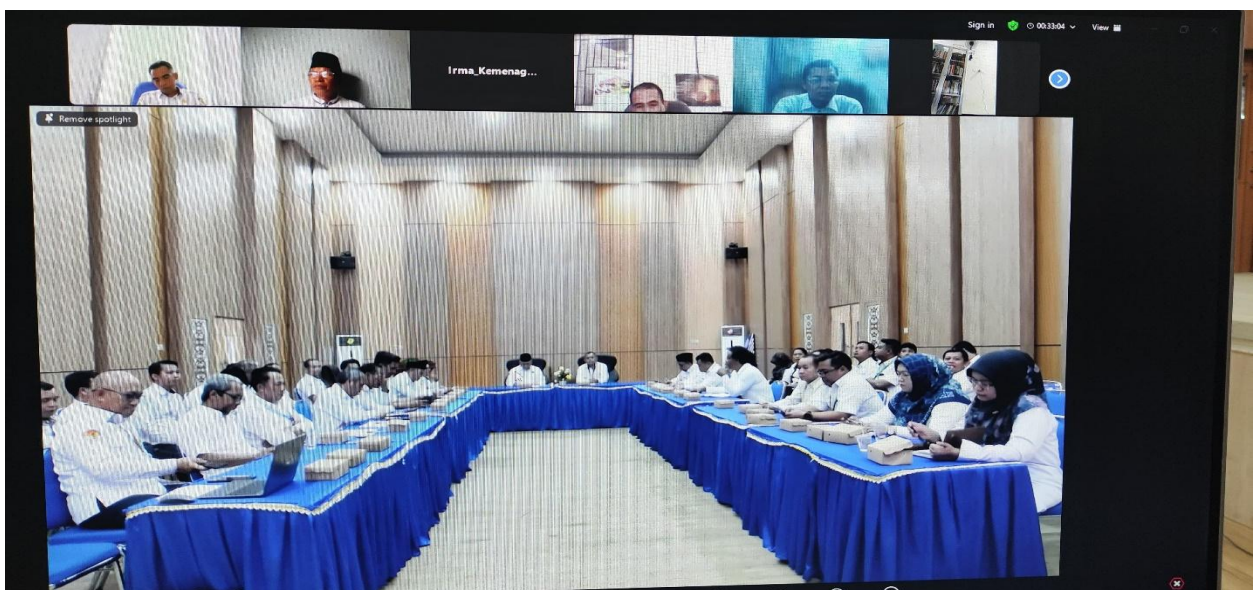
Dengan kualitas perencanaan dan anggaran yang meningkat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengelola sumber daya secara lebih efisien, meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta memastikan program-program yang dilaksanakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah



Keg Evaluasi LAKIP dan Rentra Tahun 2020 – 2024 dan Persiapan Penyusunan Renstra 2025 - 2029



Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan : 47. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	90	95	105.56% (Sangat Baik)
Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	85	90	105.88% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan serta anggaran yang dialokasikan berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat optimal, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan. Pemantauan dan evaluasi (M&E) yang berkualitas memungkinkan identifikasi dini terhadap hambatan, penyimpangan, atau inefisiensi, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi mencakup:

1. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-monitoring, memungkinkan proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara real-time dan terintegrasi. Dengan sistem ini, data tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat diakses dengan mudah, mempercepat identifikasi masalah, dan meningkatkan akurasi pelaporan.

2. Penerapan Indikator Kinerja yang Jelas dan Terukur

Kualitas M&E ditingkatkan dengan menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program dan efisiensi penggunaan anggaran, memastikan bahwa output dan outcome sesuai dengan perencanaan.

3. Kapasitas SDM yang Kompeten

Pelatihan dan pendampingan bagi para petugas pemantauan dan evaluator dilakukan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dalam menganalisis data, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi yang berbasis bukti.

4. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas independen.

Pendekatan partisipatif ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas hasil evaluasi.

5. Penyusunan Laporan Evaluasi yang Komprehensif

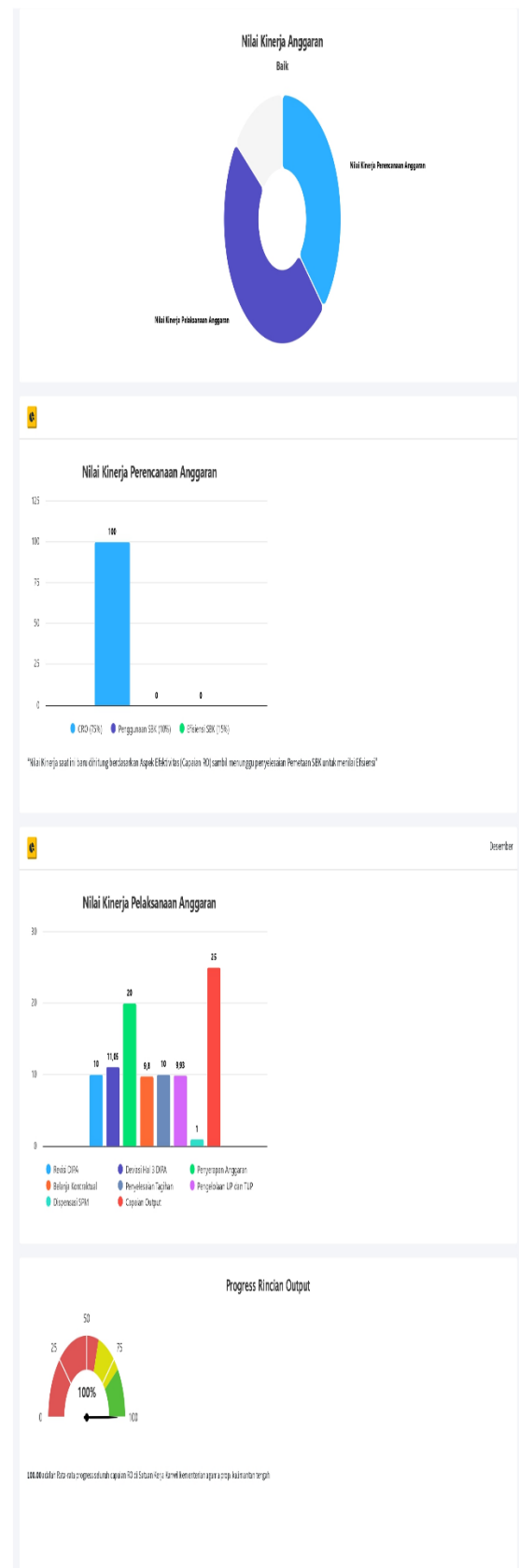
Laporan pemantauan dan evaluasi yang disusun tidak hanya mencakup capaian fisik dan keuangan, tetapi juga analisis dampak program terhadap masyarakat. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan anggaran di masa mendatang.

Dengan meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dapat memastikan bahwa perencanaan dan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan hasil pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan sumber data dari Aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan capaian pelaksanaan perencanaan dan anggaran pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. 418760 (Sekretariat Jenderal)

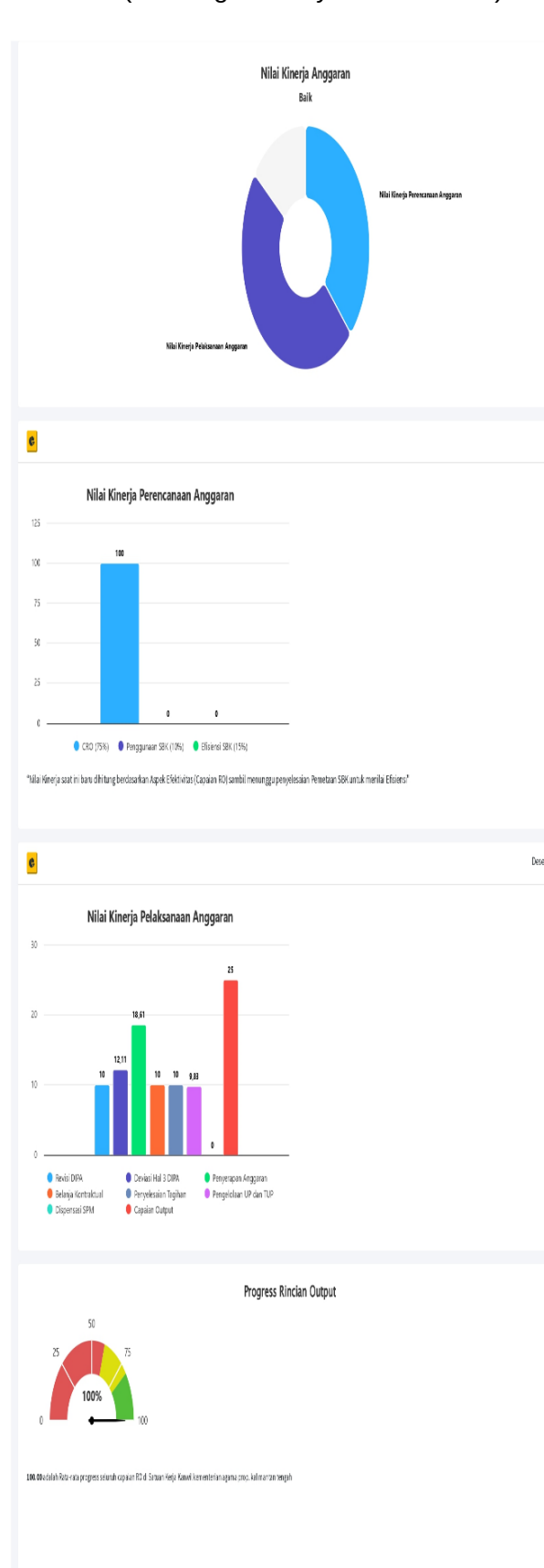
2. 418761 (Bimbingan Masyarakat Islam)



3. 418762 (Pendidikan Islam)



4. 418763 (Bimbingan Masyarakat Kristen)



5. 418764 (Pembimas Katolik)

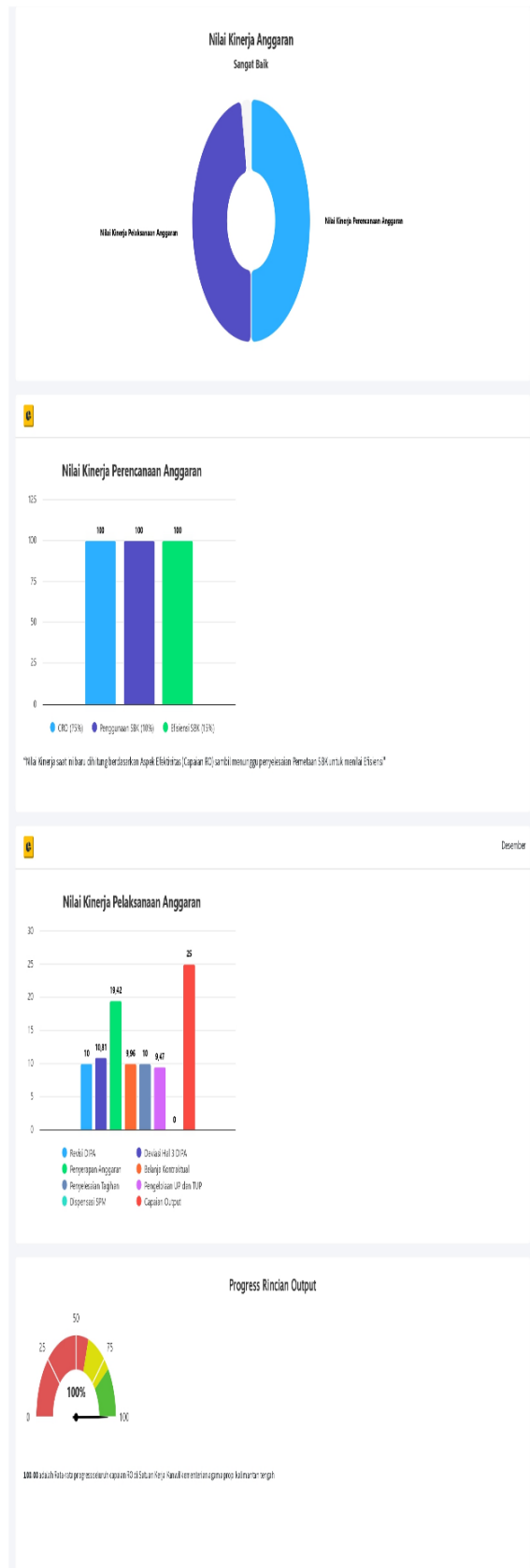
6. 418765 (Bimbingan Masyarakat Hindu)



7. 418766 (Pembimas Buddha)



8. 418767 (Bidang PHU)



Sasaran Kegiatan : 48. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	100	100	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas, efisiensi, dan kenyamanan bagi seluruh pegawai serta mendukung layanan publik yang optimal. Sarana dan prasarana yang berkualitas memastikan bahwa aktivitas administratif dan operasional dapat berjalan lancar, sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Langkah-langkah peningkatan mencakup:

1. Renovasi dan Modernisasi Fasilitas Fisik

Perbaikan infrastruktur kantor, seperti ruang kerja, ruang pertemuan, dan fasilitas umum (toilet, parkir, pantry), dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan fungsional. Desain ruang juga disesuaikan dengan kebutuhan kerja yang ergonomis, sehingga mendukung kesehatan dan kenyamanan pegawai.

2. Pengadaan Peralatan Kantor yang Modern dan Efisien

Penyediaan peralatan seperti komputer, printer, sistem telekomunikasi, dan perangkat pendukung lainnya diperbarui secara berkala untuk memastikan kelancaran operasional. Pemanfaatan teknologi terkini, seperti perangkat berbasis cloud dan otomatisasi, juga meningkatkan efisiensi kerja.

3. Penerapan Teknologi Digital dalam Sarana Kerja

Kantor modern mengintegrasikan sistem digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, sistem manajemen dokumen elektronik, dan perangkat kolaborasi online. Hal ini memungkinkan pegawai bekerja lebih fleksibel, bahkan dalam situasi kerja jarak jauh.

4. Penyediaan Fasilitas Penunjang Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas seperti ruang istirahat, area olahraga, tempat ibadah, dan layanan kesehatan menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan pegawai. Sarana ini tidak hanya mendukung produktivitas tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.

5. Pengelolaan Prasarana yang Berkelanjutan

Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan sistem hemat

energi, membantu menciptakan kantor yang berkelanjutan dan efisien dalam jangka panjang.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor, produktivitas dan efisiensi kerja pegawai meningkat, sementara layanan publik yang diberikan menjadi lebih cepat, tepat, dan memuaskan. Selain itu, fasilitas yang memadai juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pegawai, memperkuat motivasi kerja, dan mendorong tercapainya tujuan organisasi secara lebih optimal.

Sasaran Kegiatan : 49. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	95	95	100% (Sangat Baik)
Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	80	80	100% (Sangat Baik)
Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	85	85	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen administrasi dan pengadaan. Hal ini bertujuan mendukung kelancaran operasional organisasi serta memastikan pelayanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan.

1. Pengelolaan Tata Persuratan

a. Digitalisasi Sistem Persuratan

Sistem tata persuratan diubah dari manual ke digital melalui aplikasi e-surat, yang memungkinkan pengelolaan surat masuk dan keluar secara cepat, aman, dan terdokumentasi. Hal ini mempercepat proses distribusi informasi dan mempermudah pelacakan status surat.

b. Standarisasi Prosedur

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaan tata persuratan memastikan proses berjalan efisien dan seragam di seluruh unit organisasi.

c. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan bagi petugas administrasi memastikan mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan sistem digital dan memahami aturan terkait tata persuratan.

2. Pengelolaan Arsip

a. Digitalisasi dan Automasi Arsip

Arsip fisik diubah menjadi arsip digital dengan sistem manajemen arsip elektronik (e-arsip). Hal ini mempermudah pencarian, pemeliharaan, dan penyimpanan arsip dalam jangka panjang.

b. Penerapan Sistem Klasifikasi Arsip

Klasifikasi arsip dilakukan berdasarkan kategori pentingnya dokumen, masa simpan, dan urgensi, sehingga memudahkan akses dan mengurangi risiko kehilangan data.

c. Penyediaan Infrastruktur Arsip yang Memadai

Fasilitas penyimpanan arsip fisik diperbaiki untuk memastikan keamanan dokumen penting, seperti perlindungan terhadap kebakaran, kelembaban, dan kerusakan fisik lainnya.

3. Layanan Pengadaan Barang/Jasa

a. Transparansi melalui Sistem e-Procurement

Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui platform elektronik yang memungkinkan proses tender dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Sistem ini meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi korupsi, dan memastikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.

b. Penerapan Pengadaan Berbasis Kinerja

Penilaian penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan kinerja sebelumnya, memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

c. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengadaan

Pelatihan dan sertifikasi diberikan kepada petugas pengadaan untuk memastikan mereka memahami regulasi terbaru dan mampu menjalankan tugas secara profesional.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip, dan layanan pengadaan barang/jasa, organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan akuntabel. Informasi dan dokumen menjadi lebih mudah diakses dan aman, sementara proses pengadaan berlangsung lebih transparan dan menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan organisasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola yang baik.

Sasaran Kegiatan : 50. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	90	90	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa layanan administratif, operasional, dan logistik dalam suatu organisasi berjalan dengan lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Peningkatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas pegawai dan memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

1. Pelayanan Umum

a. Digitalisasi Proses Administrasi

Pelayanan umum ditingkatkan melalui implementasi sistem berbasis teknologi, seperti aplikasi layanan internal dan platform digital untuk pengajuan kebutuhan administratif, sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan.

b. Standarisasi Prosedur Layanan

Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur diterapkan untuk semua jenis pelayanan, memastikan efisiensi dan keseragaman kualitas di seluruh unit organisasi.

c. Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan

Pelatihan rutin diberikan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen, dan penguasaan teknologi yang mendukung layanan.

2. Pelayanan Rumah Tangga

a. Pengelolaan Fasilitas Kantor yang Efisien

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kantor, seperti kebersihan, peralatan kerja, sistem pencahayaan, dan pendingin ruangan, dilakukan secara terencana untuk menciptakan kenyamanan lingkungan kerja.

b. Peningkatan Manajemen Logistik

Pengelolaan kebutuhan logistik, seperti penyediaan alat tulis, perlengkapan kantor, dan kebutuhan operasional lainnya, dilakukan melalui sistem inventaris yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan tepat waktu.

c. Pengelolaan Kendaraan Operasional

Pemeliharaan dan pengaturan penggunaan kendaraan dinas dilakukan secara efektif untuk mendukung mobilitas pegawai dan operasional organisasi.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

a. Sistem Layanan Mandiri

Pengembangan sistem layanan mandiri berbasis digital, seperti portal intranet atau aplikasi mobile, mempermudah pegawai dalam mengakses layanan umum dan rumah tangga secara mandiri.

b. Monitoring dan Evaluasi Layanan

Proses evaluasi rutin dilakukan untuk mengukur kualitas layanan, termasuk survei kepuasan pengguna, yang digunakan sebagai dasar perbaikan layanan di masa mendatang.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga, operasional organisasi menjadi lebih lancar, pegawai dapat bekerja dengan lebih nyaman, dan kebutuhan administratif terpenuhi dengan lebih cepat. Hal ini tidak hanya mendukung produktivitas pegawai, tetapi juga menciptakan citra organisasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan internal maupun eksternal.

Sasaran Kegiatan : 51. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Berita	95	100	105.26% (Sangat Baik)
Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	%	95	100	105.26% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat (humas) dan informasi mencerminkan upaya untuk membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan responsif antara organisasi dan publik. Layanan humas yang berkualitas bertujuan memperkuat citra positif organisasi, menyampaikan informasi yang relevan, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

1. Penguatan Sistem Komunikasi Publik

a. Penggunaan Teknologi Digital

Pemanfaatan platform digital, seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi berbasis mobile, memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat, terjangkau, dan menjangkau audiens yang lebih luas.

- b. Penerapan Strategi Komunikasi Terpadu
Strategi ini memastikan konsistensi pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga informasi yang diterima publik lebih jelas dan terpercaya.
- 2. Peningkatan Kompetensi SDM Humas
 - a. Pelatihan dan Sertifikasi
Pegawai di bidang humas dibekali pelatihan terkait keterampilan komunikasi, pengelolaan media, dan manajemen krisis untuk menghadapi berbagai situasi yang berpotensi memengaruhi citra organisasi.
 - b. Kemampuan Analisis dan Manajemen Isu
Humas dilatih untuk memantau opini publik dan tren media guna mengantisipasi isu yang dapat berdampak pada reputasi organisasi.
- 3. Transparansi dan Akuntabilitas Informasi
 - a. Pelayanan Informasi Publik
Peningkatan kualitas layanan informasi dilakukan dengan memastikan keterbukaan data yang relevan, sesuai dengan peraturan keterbukaan informasi publik, untuk memberikan akses yang mudah kepada masyarakat.
 - b. Responsivitas Terhadap Umpan Balik
Layanan pengaduan dan saran yang dikelola secara profesional memastikan bahwa masukan dari masyarakat ditindaklanjuti secara cepat dan memadai.
- 4. Manajemen Krisis dan Hubungan Media
 - a. Tanggap Krisis
Protokol komunikasi krisis diterapkan untuk menghadapi situasi yang berpotensi memengaruhi citra organisasi, seperti penanganan isu negatif atau insiden darurat.
 - b. Kemitraan dengan Media
Humas membangun hubungan yang baik dengan media massa untuk memastikan pemberitaan yang akurat dan mendukung reputasi organisasi.
- 5. Evaluasi dan Inovasi Layanan
 - a. Survei Kepuasan Publik
Penilaian secara berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas layanan humas dan informasi, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan.
 - b. Pengembangan Konten Kreatif

Produksi konten informatif dan menarik, seperti infografis, video, dan artikel, membantu meningkatkan pemahaman publik terhadap program dan kebijakan organisasi.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas layanan humas dan informasi, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan penyebaran informasi yang relevan dan akurat. Hal ini mendukung terciptanya komunikasi dua arah yang konstruktif, memperkuat citra positif organisasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program yang dijalankan.

Sasaran Kegiatan : 52. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	%	90	95	105.56% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi mencerminkan upaya untuk memastikan pengelolaan data yang lebih akurat, relevan, dan terintegrasi, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Kualitas data dan sistem informasi yang baik menjadi dasar penting dalam mendukung efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas di berbagai sektor.

1. Pengelolaan Data yang Akurat dan Terintegrasi

a. Standarisasi Data

Data dikelola berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi, validitas, dan relevansi. Hal ini mencakup penentuan format, terminologi, dan metode pengumpulan data.

b. Integrasi Sistem Data

Data dari berbagai unit atau lembaga diintegrasikan dalam satu sistem pusat untuk mempermudah akses, pengolahan, dan analisis. Integrasi ini mengurangi redundansi data dan memastikan sinkronisasi informasi antarunit.

c. Pemutakhiran Data Secara Berkala

Proses pembaruan data dilakukan secara rutin untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi sesuai perkembangan terkini.

2. Pengembangan Sistem Informasi yang Canggih

a. Pemanfaatan Teknologi Digital

Sistem informasi dirancang dengan teknologi terbaru, seperti big data, cloud computing, dan artificial intelligence, untuk mendukung pengelolaan dan analisis data yang lebih cepat dan mendalam.

b. Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web dan Mobile

Sistem berbasis web atau aplikasi mobile mempermudah pengguna dalam mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, meningkatkan efisiensi kerja dan layanan.

c. Keamanan Data dan Sistem

Langkah-langkah keamanan, seperti enkripsi data, firewall, dan kontrol akses, diterapkan untuk melindungi data sensitif dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Pelatihan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Pelatihan diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data dan menggunakan sistem informasi dengan optimal.

b. Pengembangan Kompetensi Analitik

Kemampuan analisis data ditingkatkan agar hasil pengolahan data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

4. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

a. Monitoring dan Audit Sistem Informasi

Evaluasi rutin terhadap sistem informasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan.

b. Penyempurnaan Berbasis Umpan Balik

Masukan dari pengguna sistem digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut, memastikan sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan.

5. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

a. Peraturan Pengelolaan Data

Kebijakan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan privasi.

b. Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur IT

Dukungan anggaran untuk pengadaan perangkat keras dan lunak yang mendukung pengelolaan data dan sistem informasi lebih optimal.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, organisasi mampu membuat keputusan yang lebih berbasis bukti, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Data yang akurat dan sistem informasi yang handal juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam tata kelola organisasi, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program dan kebijakan.

Sasaran Kegiatan : 53. Meningkatkan kualitas administrasi pendidikan keagamaan

INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	orang	2250	2250	100% (Sangat Baik)

Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan mencerminkan upaya untuk memperkuat pengelolaan dan tata kelola pendidikan berbasis agama secara lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Administrasi pendidikan keagamaan yang baik menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik, mendukung proses pembelajaran, dan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta didik, pendidik, serta masyarakat.

1. Penguatan Sistem Administrasi Pendidikan

a. Digitalisasi Administrasi

Sistem administrasi manual digantikan dengan aplikasi berbasis digital untuk pengelolaan data siswa, guru, kurikulum, dan keuangan. Hal ini mempermudah akses informasi, mempercepat proses administratif, dan meningkatkan transparansi.

b. Standarisasi Prosedur Administrasi

Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk berbagai aspek administrasi, seperti pendaftaran siswa, pengelolaan keuangan, dan pelaporan, memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara seragam dan efisien.

c. Pemantauan dan Evaluasi Rutin

Proses administrasi dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan relevan dan memberikan hasil yang optimal.

2. Pengelolaan Data yang Akurat dan Terintegrasi

a. Pembuatan Basis Data Terpadu

Data siswa, guru, dan sarana prasarana pendidikan keagamaan dikumpulkan dalam satu sistem terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

b. Pemutakhiran Data

Data diperbarui secara rutin untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi, sehingga mendukung perencanaan dan evaluasi yang lebih baik.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Administrasi

a. Pelatihan Manajemen Administrasi

Petugas administrasi pendidikan keagamaan dibekali pelatihan terkait teknologi informasi, manajemen dokumen, dan layanan administrasi yang berkualitas.

b. Penguatan Kompetensi Layanan

Pelayanan administrasi diarahkan untuk lebih ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat.

4. Penguatan Tata Kelola Keuangan

a. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara transparan dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan regulasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Administrasi keuangan juga mencakup pengelolaan dana bantuan dengan memastikan penyaluran dan penggunaannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

5. Dukungan Infrastruktur Administrasi

a. Fasilitas yang Memadai

Penyediaan ruang administrasi yang layak, peralatan kerja modern, dan akses teknologi memastikan kelancaran proses administratif.

b. Integrasi dengan Sistem Nasional

Administrasi pendidikan keagamaan diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional untuk memastikan sinkronisasi data dan kebijakan.

Dampak Positif

Dengan meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan, proses pengelolaan pendidikan menjadi lebih efisien dan transparan. Hal ini mendukung peningkatan mutu layanan kepada siswa dan guru, memperkuat tata kelola lembaga

pendidikan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Selain itu, administrasi yang baik juga memastikan bahwa pendidikan keagamaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zaman.

B. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Pagu anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar Rp.107.477.711.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.106.906.366.063,- atau sebesar 99,47%.

REALISASI ANGGARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINS KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 dan 2024

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	2023			2024		
			PAGU	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	418760	SEKJEN	21.491.900.000	21.481.936.691	99,95	27.079.154.000	26.865.777.353	99,21
2	418761	BIMAS ISLAM	9.291.251.000	8.519.496.333	91,69	5.911.591.000	5.802.297.570	98,15
3	418762	PENDIS	33.654.547.000	33.466.909.372	99,44	59.268.272.000	59.047.382.854	99,63
4	418763	BIMAS KRISTEN	1.616.000.000	1.612.982.854	99,81	1.433.990.000	1.430.094.910	99,73
5	418764	BIMAS KATOLIK	2.453.854.000	2.426.697.198	98,89	1.204.322.000	1.204.318.500	100,00
6	418765	BIMAS HINDU	3.045.700.000	3.039.488.930	99,80	2.232.136.000	2.222.166.599	99,55
7	418766	BIMAS BUDHA	2.087.650.000	2.083.604.611	99,81	1.570.170.000	1.561.407.411	99,44
8	418767	PHU	17.999.805.000	17.967.256.060	99,81	8.778.076.000	8.772.920.866	99,94
JUMLAH			91.640.707.000	90.598.372.049	98,86	107.477.711.000	106.906.366.063	99,47

REALISASI ANGGARAN PER PAGU BELANJA PER SATKER KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALTENG TAHUN 2024

No.	Kode Satker	Satker	Pegawai		Barang		Modal		BanSos		Total		
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	418760	Sekjen	19.307.345.000	19.305.559.523	6.483.473.000	6.271.890.410	1.288.336.000	1.288.327.420			27.079.154.000	26.865.777.353	99.21%
2	418761	Bimas Islam			3.011.591.000	2.909.006.070	2.900.000.000	2.893.291.500			5.911.591.000	5.802.297.570	98.15%
3	418762	Pendis	20.448.489.000	20.319.544.400	2.668.573.000	2.627.552.429	36.151.210.000	36.100.286.025			59.268.272.000	59.047.382.854	99.63%
4	418763	Bimas Kristen	405.500.000	405.500.000	978.490.000	974.594.910			50.000.000	50.000.000	1.433.990.000	1.430.094.910	99.73%
5	418764	Bimas Katolik	336.250.000	336.250.000	848.072.000	848.068.500	20.000.000	20.000.000			1.204.322.000	1.204.318.500	100%
6	418765	Bimas Hindu			2.232.136.000	2.222.166.599					2.232.136.000	2.222.166.599	99.55%
7	418766	Bimas Budha	272.000.000	272.000.000	1.298.170.000	1.289.407.411					1.570.170.000	1.561.407.411	99.44%
8	418767	PHU			3.034.935.000	3.030.307.724	5.743.141.000	5.742.613.142			8.778.076.000	8.772.920.866	99.94%
Jumlah			40.769.584.000	40.638.853.923	20.555.440.000	20.172.994.053	46.102.687.000	46.044.518.087	50.000.000	50.000.000	107.477.711.000	106.906.366.063	99.47%

REALISASI ANGGARAN PER PAGU BELANJA PER SATKER KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALTENG TAHUN 2023

No.	Kode Satker	Satker	Pegawai		Barang		Modal		BanSos		Total		
			Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	%
1	418760	Sekjen	13.950.708.000	13.947.301.380	5.821.192.000	5.814.679.761	1.720.000.000	1.719.955.550	-	-	21.491.900.000	21.481.936.691	99,95
2	418761	Bimas Islam	-	-	5.028.251.000	4.262.295.333	4.263.000.000	4.257.201.000	-	-	9.291.251.000	8.519.496.333	91,69
3	418762	Pendis	16.288.087.000	16.169.609.400	5.344.167.000	5.275.008.172	12.022.293.000	12.022.291.800	-	-	33.654.547.000	33.466.909.372	99,44
4	418763	Bimas Kristen	601.000.000	601.000.000	903.000.000	900.482.854	78.000.000	77.500.000	34.000.000	34.000.000	1.616.000.000	1.612.982.854	99,81
5	418764	Bimas Katolik	555.000.000	546.500.000	1.883.854.000	1.865.197.198	15.000.000	15.000.000	-	-	2.453.854.000	2.426.697.198	98,89
6	418765	Bimas Hindu	-	-	3.045.700.000	3.039.488.930	-	-	-	-	3.045.700.000	3.039.488.930	99,80
7	418766	Bimas Budha	315.000.000	315.000.000	1.733.650.000	1.729.604.611	39.000.000	39.000.000	-	-	2.087.650.000	2.083.604.611	99,81
8	418767	PHU	-	-	3.670.435.000	3.666.493.608	14.329.370.000	14.300.762.452	-	-	17.999.805.000	17.967.256.060	99,82
Jumlah			31.709.795.000	31.579.410.780	27.430.249.000	26.553.250.467	32.466.663.000	32.431.710.802	34.000.000	34.000.000	91.640.707.000	90.598.372.049	98,86

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan Penutup

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk nyata akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran Tahun 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama*.

Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 atas sasaran-sasaran program yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang BAIK, dengan capaian rata-rata sebesar 97,99%. Hasil ini mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran dalam melaksanakan program prioritas, meskipun diakui bahwa masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan.

Capaian tersebut didasarkan pada hasil pengukuran terhadap setiap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan konkret yang dapat memperkuat sistem manajemen kinerja. Beberapa strategi penting antara lain:

1. Seluruh pemilik risiko program secara aktif melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko kinerja,
2. Penyusunan rencana aksi atas Perjanjian Kinerja secara terukur dan terstruktur, serta
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan tahapan awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Proses penyempurnaan indikator dilakukan secara dinamis untuk memastikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan, kondisi aktual, serta tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang. Dengan demikian, sistem manajemen kinerja yang dibangun diharapkan

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Tahun 2024 juga merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024. Laporan ini menjadi cermin atas berbagai capaian yang telah diraih dalam kurun waktu tersebut, sekaligus menjadi dasar refleksi dalam menyusun langkah strategis untuk periode berikutnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang telah bekerja dengan dedikasi, integritas, dan profesionalisme tinggi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Akhir kata, semoga segala ikhtiar dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan serta mendapat bimbingan dan ridha dari Allah SWT. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan prima, kita optimis menyongsong masa depan yang lebih baik dan penuh keberkahan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangkaraya, 10 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah,



LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
2. Surat Tugas Nomor B-1321/Kw.15.1/1-c/KP.01.2/12/2024 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
3. Daftar link informasi dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2024.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Fahmi
Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

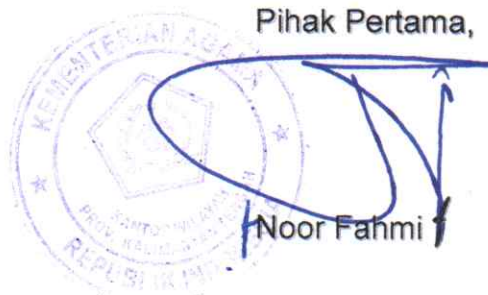
Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 60% (persen).

Semarang, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai kinerja penyuluh agama	100	Nilai
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	5	Orang
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	50	Orang
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	10	Lembaga/O rang
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	14	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	40	%
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	14	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	100	%
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	100	%
		3 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	14	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	57	Kegiatan/ko nten

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	97	%
		2 Persentase guru/ustadz pendidikan agama di madrasah/sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		3 Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	98,5	%
		4 Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		5 Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		6 Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	98,5	%
		7 Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	97	%
		8 Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	98,5	%
		9 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	4	Kegiatan
		10 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	4	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	95	%
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	97	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15	Lokasi

12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	28	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	15	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	2	Rumah Ibadah
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	1	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	11	Paket
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	3.000	Buah
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	15	%
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	8	Layanan
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	15	Lokasi
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	24	KUA
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1	KUA
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	7000	Orang
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	100	Anak
		5 Jumlah Penghulu yang dibina	125	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta	100	Keluarga

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	10	%
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	2	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	100	%
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1 Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	90	%
		2 Persentase Petugas Haji yang Profesional	90	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	80	%
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	95	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	%
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	16	Akta
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1 Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	%
		2 Persentase madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	80	%
		3 Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	11	Madrasah

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1 Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	91	%
		2 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	82.00	%
		3 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	70	Kegiatan
		4 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah	70	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	98	%
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	99	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		2 Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		3 Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
		4 Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	75	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	80.619	Siswa
		2 Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	99.50	%
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/ PDF/Muadalah	100	%
		4 Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	25	%

30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	50	%
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	50	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang	7.789	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah /sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	99	%
		2 Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99	%
		3 Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	99	%
		4 Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	99.50	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99.50	%
		2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	99.00	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1 Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	99.00	%
		2 Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG	99.00	%
		3 Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	99.50	%
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	50	Madrasah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1 Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	99	%
		2 Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	99	%

		3 Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	100	%
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1 Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	100	%
		3 Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	100	%
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	150	madrasah
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	527	Madrasah
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	100	%
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100	%
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	5	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan,	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90	%
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	85	%
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	70	%
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	60	%
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	70	%

		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	84	%
		7 Persentase data ASN yang diupdate	95	%
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	79	%
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1 Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	95	%
		2 Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	97	%
		3 Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	99	%
		4 Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	%
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1 Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	95	%
		2 Persentase tanah yang bersertifikat	100	%
		3 Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	95	%
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1 Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75	%
		2 Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	%
		3 Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80	%
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1 Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90	%
		2 Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	35	satker

		3 Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	35	orang
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1 Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	%
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	%
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	%
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85	%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	100	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	95	%
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	%
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	90	%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	95	%
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	95	%
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable	90	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah pengawas, guru, pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	2250	orang

Nilai Kinerja Anggaran : 95

Program	Anggaran
1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Beragama	Rp17.244.280.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	Rp386.646.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp4.247.827.000
pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp659.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp1.169.800.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp764.000.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	Rp1.441.690.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	Rp715.630.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	Rp839.890.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	Rp874.150.000
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	Rp59.784.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	Rp5.663.093.000
Pembinaan Haji	Rp422.770.000
2 Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	37.396.210.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	Rp36.151.210.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	Rp141.500.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	Rp791.500.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	Rp312.000.000
3 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Rp 18.141.017.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	Rp1.826.869.000

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Rp14.336.232.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	Rp464.396.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	Rp405.000.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	Rp148.000.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	Rp376.200.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	Rp499.320.000
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Budha	Rp85.000.000
4 Program Dukungan Manajemen	Rp. 30.499.946.000
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	Rp80.000.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	Rp250.000.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	Rp9.921.903.000
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	Rp100.000.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	Rp285.801.000
Pembinaan Administrasi Umum	Rp4.813.340.000
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Rp314.199.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	Rp2.067.177.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Bimas Kristen	Rp250.000.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	Rp110.300.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	Rp237.122.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	Rp191.000.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	Rp285.940.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	Rp319.400.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp2.632.429.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis
Lainnya Bimas Islam
Dukungan Manajemen Pendidikan

Rp671.678.000

Rp7.968.657.000

Jumlah Seluruh

Rp. 103.281.453.000

Semarang, 18 Desember 2023

Atasan Pimpinan Satuan Kerja,



Pimpinan Satuan Kerja,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Brigjen Katamso No. 3 Palangka Raya 73111

Telepon/Fax (0536) 3221734

e-mail: kanwil Kalteng@kemenag.go.id website : www.kalteng.kemenag.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR:B-1321/Kw.15.1/1-c/KP.01.2/12/2024

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Dasar : 1. KMA Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Arsip di Lingkungan Kementerian Agama.
2. KMA Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama.
3. Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : B-1560/Kw.15.1/1-d/OT.01.2/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Mohon diberikan surat tugas.

Memberi Tugas

Kepada : Nama – nama sebagaimana terlampir.

Untuk : Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Palangka Raya, 31 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah,

\$_{ttd}\$

H. Noor Fahmi

Lampiran :
Surat Tugas NOMOR:B-1321/Kw.15.1/1-c/KP.01.2/12/2024

No.	Nama/NIP	Jabatan	Satuan Kerja
1.	Wahyu Ikhsanuddin, S.Fil.,M.A.P NIP. 198209232009121003	Plt. Kepala Bagian Tata Usaha (Koordinator)	Bagian Tata Usaha
2.	Ismail Marzuki NIP. 197411062006041002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Tata Usaha
3.	Maturidi, S.Ag. NIP. 197403042009101001	Pranata Humas Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
4.	Noorhasanah NIP. 197810282005012012	Perencana Ahli Muda	Bagian Tata Usaha
5.	Muhammad Arfani NIP. 197710152009101001	Perencana Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
6.	Tri Hendra Susila NIP. 198809232020121004	Penata Laporan Keuangan	Bagian Tata Usaha
7.	Rosyid Ali NIP. 199405092019031005	Analisis Jabatan	Bagian Tata Usaha
8.	Fitrah Minangsari NIP. 199612112020122010	Perencana Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
9.	Jamilah Maisura NIP. 198612252005012001	Analisis Tata Laksana	Bagian Tata Usaha
10.	Rizkia Nur Apriani NIP. 199704082023212022	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
11.	Gita Eret Pahlawan, S.Kom. NIP. 199002212023211024	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
12.	Sahdi NIP. 199202032023211020	Perencana Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
13.	Wilis Rosana, S.Pd.I NIP. 197611202023212012	Arsiparis Ahli Pertama	Bagian Tata Usaha
14.	Huges, SE. NIP. 198004042005011003	Perencana Ahli Pertama	Bidang Pendidikan Madrasah
15.	Gondo Utomo NIP. 198101292005011003	Pamong Belajar Ahli Muda	Bidang PAKIS
16.	M. Faisal Hadi D NIP. 199211192019031007	Perencana Ahli Pertama	Bidang PHU
17.	Noor Ahdiyati NIP. 197809242003122002	Penyusun Administrasi Kepenghuluan	Bidang Bimas Islam
18.	Royue Leo Sudana NIP. 198508182011011008	Perencana Ahli Muda	Bidang Bimas Kristen
19.	Willy Swastika NIP. 198403122009122004	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Bidang Bimas Hindu
20.	Mario Asensio Saputra Ndoa NIP. 199205262023211018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Bimas Katolik
21.	Teguh Dedi Winarko NIP. 198601052023211014	Arsiparis Ahli Pertama	Bimas Buddha

Palangka Raya, 31 Desember 2024
Kepala Kantor Wilayah,



H. Noor Fahmi

DAFTAR LINK INFORMASI DAN KEGIATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

1. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526582/21-Pejabat-Fungsional-Resmi-Dilantik>
2. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526676/Buka-Orientasi-Pelopop-PMB-Kakanwil-Upaya-Perkuat-Pemahaman-Moderasi-Beragama>
3. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526679/Kakanwil-Tekankan-Peran-ASN-Kemenag-sebagai-Penggerak-Moderasi-Beragama>
4. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526699/2116-Pelamar-CPNS-Kemenag-Kalteng-Lolos-Seleksi-Administrasi>
5. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526759/Kakanwil-Alhamdulillah-Indeks-Kepuasan-Jemaah-Haji-2024-Naik->
6. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526912/Mengenang-G30SPKI-Kakanwil-Ajak-Perkuat-Nilai-nilai-Pancasila-dan-Kebangsaan>
7. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526951/Hasil-Rapat-Ungkap-Serapan-Anggaran-Kemenag-Kalteng->
8. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/526996/MAN-2-Pulang-Pisau-Terima-Gedung-Baru-Dari-PUPR>
9. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527060/Persiapan-Susun-Renstra-2025-2029-Pokjanas-Perencana-Gelar-Muswil>
10. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527123/18-Kontingen-Dipastikan-Mengikuti-Kanwil-Kemenag-Cup-2024>
11. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527226/Kejuaraan-Kanwil-Kemenag-Cup-II-Resmi-Dibuka->
12. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527305/Puncak-Hari-Santri-2024-Momentum-Memperkuat-Komitmen-Kebangsaan>
13. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527422/Upacara-Hari-Sumpah-Pemuda-2024-Kakanwil-Tekankan-Potensi-Pemuda-Dalam-Pembangunan>
14. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527623/Kakanwil-Hadiri-Mudzakarah-Perhajian-Bahas-Isu-Krusial-Penyelenggaraan-Haji>
15. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527668/Kakanwil-Pagi-Ini-Pimpin-Apel-Peringatan-Hari-Pahlawan>

16. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527685/Kakanwil-Minta-Penyuluh-Agama-Sukseskan-Pilkada>
17. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527750/Kakanwil-Dampingi-Asisten-Kesra-Lepas-Kontingen-Kalteng-ke-Porsadinan-VI>
18. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527836/Hari-Ini-Rakernas-Kemenag-Berakhir-Ada-3-Poin-yang-Disepakati>
19. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527914/Di-Kalteng-Ada-68-Biro-Travel-Perjalanan-Haji-dan-Umrah-Berizin>
20. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527927/118-Peserta-Ikut-Cat-PPIH-Kakanwi-Harus-Familiar-dengan-Digital>
21. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527948/Peran-Penyuluh-Agama-Wujudkan-Pilkada-Damai>
22. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/527992/Peringatan-Hari-Guru-Nasional-2024-Begini-Pesan-Kakanwil>
23. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528038/Lepas-H-Tuaini-Purna-Tugas-Kakanwil-Terimakasih-Pengabdianannya>
24. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528106/Sinergi-Kemenag-dan-BWI-Perkuat-Ekosistem-Wakaf>
25. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528122/Kakanwil-Jelaskan-Peran-Penyuluh-Agama-Dalam-Pencegahan-Narkoba>
26. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528169/Kakanwil-Launching-Rangkaian-Kegiatan-HAB-ke-79-Kemenag>
27. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528196/MTQH-XXXII-Kalteng-Kakanwil-Luangkan-Waktu-Membaca-Alquran>
28. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528233/Agenda-Hari-Ini-Kakanwil-Terima-DIPA-dan-Pimpin-Doa-Pelantikan-Pj-Walikota>
29. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528251/Lanjutkan-Kerja-Sama-Kemenag-Tandatangani-PKS-Dengan-Mandiri>
30. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/528463/Menjuju-WHO-2026-Kakanwil-Kemenag-Ajak-Stakeholder-Bersinergi>



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2024



kanwilkalteng@kemenag.go.id

www.kalteng.kemenag.go.id

